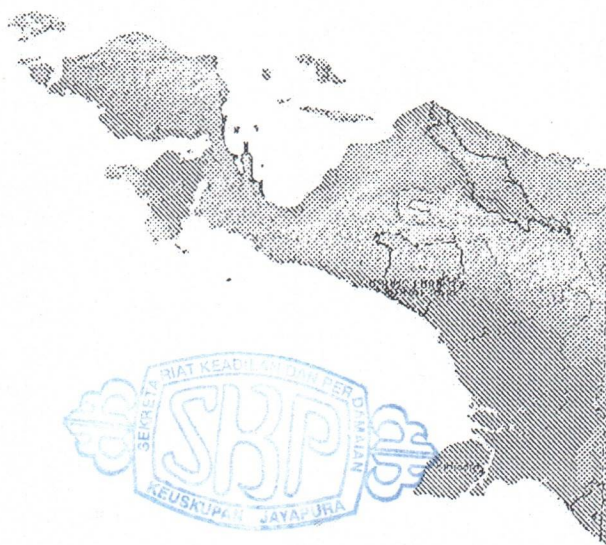


“Bahaya *illegal logging* di Papua”

(April – Juni 2005)



Sekilas Informasi

OLEH

SEKRETARIAT KEADILAN & PERDAMAIAN
KEUSKUPAN JAYAPURA

Agustus 2005

Sepatah Kata

Mengikuti dinamika sosial politik di Tanah Papua yang luas ini tidaklah selalu mudah. Sekretariat Keadilan Perdamaian Jayapura mencoba untuk setia dan tekun dalam mendokumentasikan gambaran aktual masyarakat Papua dari sudut hak asasi manusia. Tentu tidak semua peristiwa dapat direkam dalam tulisan sederhana ini tetapi apa yang dicatat diharapkan dapat mencerminkan suasana umum yang terjadi di Papua dalam tiga bulan terakhir.

Sekali lagi kami mohon maaf kepada para pembaca atas keterlambatan edisi kedua ini akibat dari tuntutan mendesak yang datang tiba-tiba kepada kami akibat kebutuhan rakyat Papua yang ada di lapangan. Kebutuhan pelayanan tersebut kadang tidak bisa ditunda sementara SKP memiliki keterbatasan tenaga untuk menangani dokumentasi dan penelitian kecil seperti ini.

Semoga dalam edisi berikut hal ini dapat kami perbaiki.

Teriring salam dan hormat kami,

J. Budi Hernawan ofm
Penulis

Bagian I

Catatan Harian April- Juni 2005

A. HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

1 April

Pengamat Politik dan Tata Negara Uncen, Bambang Sugiono, berpendapat bahwa PILKADA bupati/ walikota se-Papua bulan Juni dinilai tidak realistik karena ketidaksiapan pemerintah.

Menanggapi pemangkasan anggaran dari Rp. 170 milyar menjadi Rp. 90 milyar, Ketua KPUD Provinsi Papua, Ferry Kareth, mengatakan, "Ya kalau menurut saya, memang dana sebesar itu yakni Rp. 90 milyar masih sangat kecil. Tapi bagaimanapun juga, pelaksanaan PILKADA akan dilaksanakan sesuai kondisi keuangan yang ada. Jadi kalau PILKADA tidak maksimal ya pasti jangan salahkan KPUD".

Kapolresta Jayapura, Moch Son Ani, menilai permintaan tim penasihat hukum terdakwa kasus Filep Karma dan Yusak Pakage untuk mengadirkan dirinya di persidangan sebagai saksi dinilai berlebihan karena keterangan saksi-saksi dalam berkas perkara dianggap sudah cukup.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Papua, Melkias Mayor, mengatakan zona damai di Papua telah berjalan dengan baik dan karena itu perlu dipertahankan. Peran tokoh agama dinilai penting dalam memberikan pengarahan kepada umatnya.

Aliansi Masyarakat Transparansi Pendukung Putra-Putra Port Numbay mendatangi DPRD Kota Jayapura guna menyatakan penolakan mereka terhadap calon walikota tunggal, calon walikota yang berasal dari luar masyarakat asli Port Numbay, calon yang terlibat KKN.

Ketua KPUD Provinsi IJB, Ny. Regina Sauyai, menghimbau kepada masyarakat agar tidak mempercayai isu-isu yang mengatakan bahwa PILKADA Provinsi IJB tidak memiliki kekuatan hukum karena MRP belum terbentuk. Pihaknya menegaskan, "Kita punya landasan hukum yang kuat, yaitu PP Nomor 6 Tahun 2005 dalam pasal 141 ayat 2 dan 3".

2 April

Dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Democratic Centre Universitas Cendrawasih Drs. M. A Musa' ad mengatakan, "Yang menjadi perdebatan seru dalam lokakarya ini adalah konsep dasar orang asli Papua. Mengenai hal ini belum mendapat kesepahaman yang baik dari para peserta yang hadir, namun semua masukan akan diakomodir lalu diajukan ke DPRP sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun Perdasi MRP nanti."

Sekitar 50-an orang warga Kabupaten Pegunungan Bintang yang dipimpin oleh Yan Kasipmabin, Spei Bidana, Kelly Aisiki, dan Primus Uropdana dan bernaung dalam Forum Pengkajian Pengembangan dan Pembangunan Pegunungan Bintang, mendesak

gubernur Papua agar Pejabat Bupati Pegunungan Bintang Wellington Wenda dicopot dari jabatannya, karena kinerjanya dinilai kurang baik bagi pembangunan kabupaten tersebut. "Kami mau gubernur harus mengganti carateker bupati sekarang ini, .ganti dengan orang lain terserah dari mana saja asalkan jujur, setia dan mau membangun Pegunungan Bintang," tegas Yan Kasipmabin.

Secara resmi partai PDK dan PKPI menyatakan mendukung Juvensius Beakai (Ketua LMA Kabupaten Asmat) berpasangan dengan Drs. FB. Sorring, S.Sos,MM (Kepala Kantor BKKBN Kabupaten Merauke) dalam Pilkada mendatang dengan mendeklarasikan pasangan calon ini.

3 April

Dandim 1707/ Merauke, Letkol Inf. Paulus Herpomo kepada pers mengatakan bahwa upaya pencarian anggota TPN/OPM di perbatasan yang dilakukan secara persuasif dan dengan pendekatan cinta kasih melalui kerjasama dengan pemda dan fasilitator seperti SKP-KAM yang selama ini cukup berperan, akhirnya membuahkan hasil dengan menyerahnya Panglima Perang Sektor Batalion Lima Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka TPN/OPM, Alm. Yosep Makunama (43) pada bulan Februari lalu. Kemudian, Senin (28/3) lalu, putra panglima tersebut yakni Matias Makunama mendatangi Bupati Merauke Drs. Jhon Gluba Gebze dan menyerahkan 1 pucuk senjata api (senpi) jenis SKS buatan Belgia. Menurut Matias, senpi tersebut itulah yang digunakan bapaknya selama beraksi di hutan dan telah lama disembunyikan di wilayah Weam-PNG, sewaktu masih hidup. Selain senpi tersebut, Dandim mengakui bahwa sebelumnya aparat juga telah menyita 1 pucuk senpi jenis spiral buatan Australia yang juga milik Yosep Makunama. Dan saat ini, dua pucuk senpi tersebut telah berada di tangan atasan/komandan.

4 April

Terkait dengan informasi tentang pencalonan DR. La Pona sebagai bupati Kabupaten Fakfak, Plh. Ketua KPUD Provinsi Papua, Drs. Muhammad A.Musa' ad, M.Si menyatakan bahwa berdasarkan aturan dan perundang-undangan Pemilu, Ketua dan Anggota KPU yang ingin mencalonkan diri dalam Pilkada harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut. Karena itu pihak KPU Provinsi Papua sudah memanggil anggota KPU kota untuk memberikan klarifikasi tentang keberadaan La Pona, Ketua KPU kota Jayapura.

Menurut Ketua KPUD Irian Jaya Barat (IJB) Ny. Regina Sauyai, waktu untuk melaksanakan Pilkada di IJB semakin mendesak namun KPUD IJB belum memiliki jadwal yang jelas kapan akan dimulai pendaftaran bagi bakal calon kepala daerah karena belum mendapat persetujuan dari DPRD IJB tentang jadwal tersebut.

Tidak diakomodirnya usulan legislatif dalam RAPBD 2005 menjadi catatan khusus pihak DPRP saat ini. Wakil Ketua Komisi C DPRP Jan Ayomi berkomentar, "Harus diakui bahwa ada aspirasi rakyat yang tidak diakomodir Rakorbangda yang dilakukan eksekutif selama ini, sehingga melalui dewan diharapkan mampu diperjuangkan." Selanjutnya dikatakan bahwa DPRP menilai eksekutif masih menggunakan pola-pola lama dimana eksekutif dinilai masih sepihak dalam proses penyusunan APBD tersebut. Pada penyusunan APBD 2006, DPRP bertekad untuk merubah mekanismenya agar sejalan dengan semangat Otonomi Khusus, maksudnya bahwa dari awal harus melibatkan pihak legislatif, jangan sampai sudah jadi dalam bentuk buku baru dibahas oleh dewan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Achmad Jumadi Kamto mengatakan bahwa meski sudah memasuki bulan keempat tetapi draf materi RAPBD Kabupaten Jayapura tahun 2005 belum diterima pihak dewan untuk dibahas. Meski drafnya saja belum di bahas namun sudah ada program yang dijalankan dengan dana Otonomi Khusus tahun 2005 ini, Misalnya proyek pengadaan lima buah bus untuk angkutan masyarakat meski belum beroperasi untuk melayani kepentingan masyarakat.

5 April

Gubernur Provinsi Papua Drs. JP Solossa M.Si di sela-sela acara Rakerda dan Musrenbangda menegaskan bahwa penyelenggaraan Pilkada bagi walikota/bupati yang masa jabatannya berakhir pada Desember 2004-Mei 2005 yang dijadwalkan pelaksanaannya pada Juni nanti, tidak boleh digeser ke bulan lain dan dikatakan bahwa pihaknya akan mengecek kesiapan tiap kabupaten/kota. Belum dilaksanakan sidang RAPBD di beberapa kabupaten jangan dijadikan sebagai alasan, sebab menurut gubernur JP Solossa rencana anggaran Pilkada bisa dibicarakan antara KPUD, pemerintah daerah dan DPRD. Soal dana pilkada yang katanya kurang karena dipangkas, gubernur mengatakan bahwa kebutuhan pilkada itu sudah dihitung dengan cermat jadi bila ada yang merasa bahwa dana sebesar Rp. 90 miliar itu masih kurang juga maka, itu omong kosong. Sementara itu, soal dana yang tidak dikelola langsung oleh KPUD melainkan dititipkan untuk dikelola oleh Biro Tata Pemerintahan sebagai instansi terkaia, menurutnya tidak ada masalah sebab baginya ini dana program juga.



Ketua KPUD Kota Jayapura, DR La Pona M.Si membatah keras kalau dirinya menghilang. Pasalnya, kepergiannya ke Fakfak sudah diketahui lembaga yang dipimpinnya itu dan dibahas dalam rapat pleno sebelum dirinya berangkat. La Pona menilai desakan agar segera melakukan rapat pleno untuk mempertimbangkan posisinya sebagai ketua dan adanya mosi tidak percaya dari Akbar Silo, salah satu anggota KPUD itu terlalu tendensius dan mempertanyakan kepentingan dibalik sikap seperti itu.

Sebanyak 252 jiwa atau 67 Kepala Keluarga pelintas batas yang hidup di PNG selama kurang lebih 40 tahun lamanya, tiba di pelabuhan Merauke dengan menggunakan kapal Maroka Ehe, sekitar pukul 12.30 WIT, setelah sebelumnya kapal tersebut berangkat dari Merauke ke PNG, Minggu 27 Maret 2005 lalu. Mereka disambut oleh Bupati Merauke Drs. Johannes Gluba Gebze, Wakil Bupati dr Benyamin Simatupang, MPH, Ketua DPRD Merauke Daniel Walinaulik, Muspida, kepala satuan dilingkungan Pemkab Merauke, dan Pimpinan BUMN/BUMD, di Ujung Dermaga Pelabuhan Merauke. Penyerahan secara simbolik dari Duta Besar RI untuk PNG diwakili Atase Petahanan Kolonel Sumiharjo Pakpahan kepada Bupati Merauke Drs. Johannes Gluba Gebze disaksikan Kepala BPKD Provinsi Papua Drs. Alex Erebus dan Konsulat RI Vanimo Abdulla Jafar ditandai dengan penandatanganan berita acara penyerahan di atas kapal Maroka Ehe. Sumiharjo Pakpahan menjelaskan bahwa mereka ini berasal dari 3 kampung di PNG yakni 203 dari Daru, 29 dari Moresby dan 20 dari Kampung Bula. Bupati Gebze mengatakan, ini merupakan peristiwa penting kedua setelah sebelumnya Desember 2003 pemerintah telah mengembalikan 16 Kepala Keluarga atau 66 jiwa.

6 April

Menurut Sekretaris KPU Provinsi IJB (Irian Jaya Barat), Letkol (Pur) Sudarman, tahapan Pilkada di IJB sudah siap dilaksanakan, namun hanya menunggu pengunduran diri Gubernur dan koordinasi antara KPU, DPRD serta Pemerintah. Menurut sumber di KPU IJB, bahwa lembaga ini telah menetapkan pendaftaran calgub yang akan dibuka pada 8 April.

7 April

Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) resmi ditutup oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua drh. Constant Karma. Namun dari 29 Kabupaten/Kota di Papua, 4 kabupaten dari Provinsi IJB tidak hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Manokwari, Teluk Wondama, Fakfak dan Teluk Bintuni, sedangkan Sorong Selatan, Kaimana, dan Raja Ampat, dihadiri oleh wakil yang bukan pejabat bupati melainkan kepala instansi lainnya. Menurut Ketua Panitia yang juga Plh. Sekda Papua, Drs. Andi Baso Bassaleng, dari pembahasan selama 3 hari tersebut (5/4-7/4) diperoleh usulan program bidang fisik prasarana, ekonomi dan sosial budaya dengan jumlah program sebanyak 5.411 yang semuanya senilai Rp 9.822.797.384.800. Namun setelah dibahas secara intensif, akhirnya yang akan diajukan ke Musrenbangnas pada 13 April di Jakarta yakni sebanyak 3.698 program dengan dana Rp 6 triliun.

Lawatan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Selandia Baru disambut demo Anggota Parlemen dari Partai Hijau (Green Party) dengan menggunakan bendera OPM dan GAM dan menuntut agar Indonesia membiarkan kedua wilayah itu memisahkan diri. Wakil Ketua Partai Hijau Rod Donald mengatakan bahwa SBY harus menyadari bahwa ribuan warga Selandia Baru menentang apa yang disebutnya sebagai "tindakan barbar militer Indonesia" terhadap warga Aceh dan Papua. Indonesia mendapat kritik dari kalangan aktivis HAM, atas fakta bahwa Indonesia telah membunuh puluhan ribu pejuang kemerdekaan di kedua wilayah tersebut. Dimana sesuai dengan laporan HAM terbaru yang dikeluarkan oleh Deplu AS, disebutkan bahwa selama tahun 2004, militer Indonesia telah membunuh, memperkosa, dan menyiksa warga sipil dan anggota kelompok pemberontak di Aceh dan Papua. Namun setelah bertemu dengan SBY, Perdana Menteri Selandia Baru Helen Clark mengatakan bahwa negaranya mendukung upaya Indonesia untuk menyelesaikan masalah separatisme di Aceh dan Papua melalui otonomi khusus.

8 April

Munculnya sinyal-sinyal dari kalangan masyarakat tidak terkecuali Gubernur Papua Drs. JP Solossa, M.Si bahwa kabupaten pemekaran Pegunungan Bintang selama dua tahun ini tidak ada kegiatan pembangunan dibantah pihak Pemkab Pegunungan Bintang. Menurut Kepala BP3D Kabupaten Pegunungan Bintang, Befa Jigibalon, bahwa sebagai kabupaten pemekaran pihaknya telah melakukan sejumlah upaya pembangunan guna menyiapkan daerahnya sebagai kabupaten definitif. Upaya yang dimaksudkan Jigibalon yakni, pembangunan kantor bupati, gedung DPRD, dan sejumlah gedung pemerintah lainnya yang katanya tidak lama lagi akan diresmikan. Sementara dibidang pendidikan, menurutnya sedang dibangun gedung sekolah mulai dari tingkat SD, SMP sampai SMA.

10 April

Operasi penyergapan yang dipimpin oleh Kapolres Puncak Jaya Kopol Hans Eduard Somnaikubun terhadap sekelompok orang yang diduga sebagai anggota TPN/OPM pimpinan Guliat Tabuni Warunggai, Minggu (10/4) Pkl. 05.30 WIT, akhirnya menembak mati 1 orang bernama Tolino Iban Gire (59). Sedangkan 2 lainnya berhasil

lolos. Sementara itu, 8 orang yang ditangkap dalam operasi tersebut, kini sedang menjalani pemeriksaan di Polres Persiapan Puncak Jaya. Mereka antara lain Yuleme Tabuni, Wuwekme Telenggen, Dinggin Enumbi, Kotianus Telenggen, Yomiron Wonorengga, Bikir Wonda, Dekius Enumbi dan Tekius Enumbi. Operasi ini dilakukan oleh Tim Reskrim Polres Persiapan Puncak Jaya dan Brimob BKO Polda Papua di sekitar Kampung Uyupi, Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya.

11 April

Delapan orang yang ditangkap di Uyupi Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya karena diduga anggota TPN/OPM pimpinan Guliat Tabuni, kini ditahan di Rutan Polres persiapan Puncak Jaya dan sedang menjalani pemeriksaan terkait dengan pembunuhan 6 warga sipil di Mulia pada tahun lalu. Sementara menurut Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. D. Sumantyan HS, SH, Polda Papua telah mengirim Tim Penyidik ke Mulia yang dipimpin oleh Direktur Intelkam Polda Papua Kombes Pol. Drs. Slamet Sopandi untuk mem *back up* tugas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polres Persiapan Puncak Jaya.

19 April

Dalam kunjungan kerjanya ke Merauke, Gubernur Papua, JP Solossa, melarang PNS terlibat dalam tim sukses PILKADA. Jika terbukti, PNS yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa pemecatan atau sanksi administrasi.

Secara publik, Gubernur JP Solossa memberikan jaminan keamanan kepada 265 orang pengungsi yang kembali dari PNG ke Merauke.

Sekitar 800 orang mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Papua untuk Demokrasi menuntut agar dua terdakwa dalam kasus Abepura 2000 dipenjarakan.

20 April

Di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II, Jayapura, Gubernur Papua, JP Solossa, melantik 10 *caretaker* bupati kabupaten pemekaran tetapi 2 orang pejabat lama tidak hadir dalam pelantikan itu, yakni Bupati Boven Digul, Wilhelmus Tuok, dan Bupati Waropen, Ones Ramandey. Kesepuluh orang tersebut adalah:

1. Mappi: Ir. H.E. Makcbon MM menggantikan Johaness Rumlus
2. Tolikara: Drs. Frans Kristantus menggantikan Wilhemus Jamlean
3. Supiori: Ir Marthen Luther Than menggantikan Jules Warikar
4. Boven Digul: FX. Soeryanto menggantikan Wilhelmus Tuok
5. Asmat: Drs. John Fahmi menggantikan Wiro Watken
6. Pegunungan Bintang: Drs. Zubeir D. Hussein menggantikan Wellington Wenda
7. Sarmi: Drs. CH Ochmabair menggantikan Drs. Eduard Fonataba MM
8. Waropen: Drs. Hans Kambu menggantikan OY Ramandey
9. Keerom: Drs. N. Kragae MM menggantikan Yusuf Wally
10. Yahukimo: T. Turnib SH. MM menggantikan Robert Wanimbo

Mereka akan bertugas selama 6 bulan dengan empat tugas utama: [1] menjalankan pemerintahan setempat, [2] mempersiapkan dan memfasilitasi PILKADA langsung bulan Juni dan Gubernur-Wakil Gubernur bulan Oktober, [3] sosialisasi MRP, [4] pembinaan internal dalam organisasi pemerintahan.

Yorrys Raweyai, anggota DPR/MPR RI, dalam konferensi persnya di Hotel Sentani Indah menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon gubernur IJB dari Partai Golkar.

Pemprov IJB mengumumkan jadwal pelantikan lima penjabat bupati yang akan melaksanakan PILKADA berdasarkan SK Mendagri tentang penunjukan caretaker bupati yang ditindaklanjuti dengan Surat Dirjen Otonomi Daerah No. 131.82/507/Otda:

No.	Kabupaten	Penjabat	Waktu pelantikan
1.	Kaimana	Ir. Abdulrahman Wasaraka MP (Kadis P dan P IJB)	25 April
2.	Teluk Wondama	Drs. JE. Hosio (Kadis Perindagkop IJB)	28 April
3.	Teluk Bintuni	Drs. J. Paiki (Ass III Pemkab Manokwari)	2 Mei
4.	Sorong Selatan	GC Auparay SH MM (Kepala Bappeda IJB)	6 Mei
5.	Raja Ampat	Drs. Jack Kapisa (Ass I IJB)	9 Mei

21 April

Diadakan pertemuan tiga pihak, yakni Gubernur Papua, JP. Solossa, Penjabat Gubernur IJB, Abraham Atururi, dan Sekretaris Menkosospolkam, Laksdya Djoko Sumaryono di Hotel Sheraton Timika guna membahas keberadaan Provinsi IJB. Pertemuan berlangsung tertutup dan sesudah pertemuan, Sekretaris Menkosospolkam menjelaskan kepada pers, "Dalam pertemuan tadi sudah jelas hasilnya bahwa penyelesaian masalah IJB itu harus dikembalikan pada Undang-Undang No. 21 tahun 2001 dan PP MRP khususnya pasal 73".

Sejumlah parpol mendeklarasikan pasangan calon walikota dan wakilnya untuk Kota Jayapura. Menase Robert Kambu berpasangan dengan Sujarwo didukung oleh Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan; sedangkan pasangan Musa Youwe dan Nur Alam didukung oleh PAN, PBR, PBB, PPNUI, PPDK, PKPB, Partai Pelopor dan PBSO.

22 April

Pangdam XVII/ Trikora, Nurdin Zainal, menyatakan bahwa pihaknya mendapatkan informasi dari Atase Pertahanan RI di PNG bahwa pada saat repatriasi pengungsi kembali ke Merauke, terdapat beberapa tokoh GPK yang betul-betul memperjuangkan kemerdekaan. "Makanya saya sudah perintahkan Dandim Merauke untuk berkoordinasi dengan Pemkab setempat agar mereka yang repatriasi diterima tanpa harus ditakut-takuti sebab tekad mereka untuk kembali ke RI, yakni Merauke karena ada jaminan keamanan".

23 April

Tiga denominasi Gereja di Papua, Kemah Injili, Gereja Baptis dan Gereja Injili di Indonesia, mengeluarkan seruan yang menyoroti budaya rekayasa dalam perkara Mulia, Puncak Jaya.

24 April

Agus Alua, Ketua AMPTPI menyatakan kepada media bahwa pihaknya akan menggelar Rakernas pada 25-30 April 2005 di Diklat Depnakertrans Jakarta dengan agenda membahas penetapan prioritas program dan mengatur langkah-langkah strategis dalam menindaklanjuti Kongres di bidang organisasi, HAM, Politik dan pembangunan, serta isu-isu strategis seperti *illegal logging*, MRP dan PILKADA.

30 April

Gubernur Papua, JP Solossa, menyatakan bahwa PILKADA Gubernur dan Wakilnya tidak perlu menunggu terbentuknya MRP mengingat UU No. 21/2001 tentang Otsus pasal 139 dan 140 yang menjelaskan bahwa pemilihan tersebut diatur oleh DPRP. Akan tetapi, karena Konstitusi menyebutkan adanya pemilihan langsung dan UU Otsus berada di bawah Konstitusi maka PILKADA gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan secara langsung.

1 Mei

Andi Asmuruf SH, hakim Pengadilan Negeri Sorong, menegaskan bahwa PILKADA di IJB sah secara hukum dengan alasan bahwa pemekaran provinsi IJB secara *de iure* dan *de facto* sah berdasarkan UU no. 45/1999.

Sekitar 100 orang massa berkumpul di Lapangan Sepakbola Trikora, Abepura untuk menolak keabsahan pelaksanaan Pepera 1 Mei 1963. Massa melakukan kebaktian bersama dan pidato politik di bawah koordinator, Yonah Wenda.

Kapolres Jayapura, AKBP Robert Djoenso, membantah adanya isu pengibaran bendera Bintang Kejora dalam cara memperingati hari 1 Mei.

2 Mei

KPU Kota Jayapura mengumumkan bahwa 2 pasangan calon gugur dan 1 parpol kena diskualifikasi karena parpol yang mendukung mereka hanya mendapatkan suara 1.444 (3.9%) sehingga tidak memenuhi syarat administrasi.

Sekitar 1000-an masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Perjuangan Hak-hak Asasi Sipil Papua menggelar demo damai ke Gedung DPRP dipimpin oleh Servius Bobi, Ketua Senat STFT Fajar Timur, dengan melakukan *long march* dari Kampus Uncen hingga Kantor DPRD Papua. Mereka menolak Otsus dan meminta agar Pepera ditinjau ulang.

Sidang perkara makar Filep Karma dan Yusak Pakage ditunda karena JPU yang diketuai Yulius D. Teuf SH tidak siap untuk membacakan tuntutan dan minta waktu 14 hari untuk menyiapkannya.

3 Mei

Menyikapi PILKADA Kabupaten/ Kota, Dewan Adat Papua mengeluarkan seruan yang menegaskan bahwa anak adat yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah supaya yang dipilih adalah anak-anak adat yang benar-benar aspiratif dan mengerti keadaan yang terjadi di masyarakat.

Menanggapi tuduhan dari pasangan Petrus Yohanes Ohoiwutun dan Harus Amrayan mengenai rekomendasi palsu dari DPD Golkar kepada pasangan Benyamin Simatupang untuk PILKADA di Asmat, Ketua DPD Golkar Papua, John Ibo, menegaskan, "Jadi tidak benar bahwa surat rekomendasi dari DPD Partai Golkar itu palsu. Kalau memang

mereka itu mengatakan bahwa tanda tangan itu palsu, itu hanyalah merupakan sikap dari ketidakpuasan calon tersebut. Karena setelah surat rekomendasi itu difotocopi dan diberikan kepada saya ternyata tanda tangan itu adalah tanda tangan saya dan bukan tanda tangan orang lain”.

Ketua DPD Partai Serikat Indonesia Provinsi Irian Jaya Barat, Ferry Auparay, dalam pernyataan persnya mengatakan bahwa pengajuan calon gubernur atau bupati/ walikota yang akan mengikuti PILKADA yang harus memenuhi dukungan 15% suara partai politik tidak perlu lagi karena pasal tersebut sudah dibatalakan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena itu pihaknya mendesak KPUD IJB agar segera mengambil langkah-langkah menyikapi Perpu No. 3 tahun 2005 dan PP No. 17/2005.

6 Mei

Menanggapi persoalan calon walikota independen di Jayapura, Ketua KPU Kota Jayapura La Pona menjelaskan kepada pers, “Bagi KPU Kota Jayapura Perpu Nomor 3 Tahun 2005 itu belum mengindikasikan secara kuat bahwa calon independen bisa masuk sebagai bakal calon kepala daerah”.

Anggota DPRD Jayawijaya, Drs. Izak Togotly, meminta kepada Pemprov Papua agar menunda pencairan dana Otsus untuk Kabupaten Jayawijaya mengingat penggunaan dana Otsus harus terlebih dulu dibahas dalam sidang RAPBD tahun anggaran 2005 padahal alat kelengkapan dewan belum dibentuk.

SKP Keuskupan Agung Merauke melaporkan bahwa Siprianus, Rafael Kapura (25 tahun) dan Bartol Yolmen yang ditangkap dan ditahan sewenang-wenang oleh Satuan Kostrad 643 di Distrik Bupul Merauke telah dibebaskan dan diserahkan ke Polres Merauke dengan dikenai wajib lapor.

9 Mei

Puluhan mahasiswa yang menamakan diri Koalisi Mahasiswa Peduli Damai melakukan unjuk rasa di KPU Kota Jayapura berkaitan dengan penolakan calon independen.

Sekitar 50 orang massa yang tergabung dalam Front Rakyat Papua Anti Militerisme mengadakan unjuk rasa ke DPRD Provinsi Papua. Kelompok ini menuntut agar Pepera 1969 ditinjau ulang, Bupati Puncak Jaya dan Kapolres Persiapan Puncak Jaya AKBP Hans E. Somnaikubun dipecat karena dianggap bertanggung jawab atas aksi kekerasan di Mulia yang lalu.

Sekitar 60 orang mantan pengungsi di PNG mendatangi Kantor DPRD Kota Jayapura mengadukan nasibnya karena merasa ditelantarkan oleh pemerintah sekembalinya dari pengungsian. Sekretaris Komisi A DPRD Kota Jayapura, Pdt. Seppy Uyo, yang mewakili dewan menanggapi keluhan tersebut dengan menjelaskan bahwa pihak DPRD akan membawanya ke pemerintah provinsi karena masalah ini berada di dalam kewenangan pemprov.

Enam kampung di Distrik Web mengancam tidak akan mengikuti PILKADA karena kepala kampung dari enam kampung tersebut belum dilantik oleh Penjabat Bupati. Kampung tersebut adalah Terpones, Bias, Tefanma, Kalibou, Milki dan Lules. Ancaman oleh masyarakat melalui pernyataan yang ditandatangani oleh 9 kepala suku ini disampaikan oleh salah seorang anggota PPK Distrik Web, Emanuel Petege kepada pers.

10 Mei

Sidang Kasus Makar Filep Karma dan Yusak Pakage berakhir dengan bentrokan antara mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Jayapura dan aparat kepolisian. Dilaporkan bahwa proses persidangan berjalan tidak wajar karena tim penasihat hukum mengaku tidak diberi waktu untuk berkoordinasi sehingga akhirnya tidak bisa hadir di persidangan. Fakta ini mendatangkan protes di kalangan mahasiswa dan pecah menjadi kerusuhan saat terjadi aksi pelemparan batu ke arah barisan polisi oleh pihak yang tak dikenal sehingga polisi melancarkan serangan ke arah massa mahasiswa. Dilaporkan 25 orang mahasiswa ditangkap dan ditahan di Polresta Jayapura, belasan orang mahasiswa dan warga luka-luka karena tindakan polisi, 3 polisi terluka, dan kerusakan materiil di sekitar lokasi kerusuhan.

11 Mei

Sebagai akibat dari bentrokan polisi dengan mahasiswa di Pengadilan Negeri Jayapura tgl. 10 Mei 2005, Kasat Samapta Polresta Jayapura, AKP Novly Pitoy, dipecat dari jabatannya karena dinilai menyalahi prosedur tetap pengendalian massa dan diperiksa oleh Provost Polda Papua. 25 orang yang ditahan langsung dilepas.

Metusalak Awom, anggota DPRD Kabupaten Maknowari, menemukan cukup banyak masalah saat mengadakan kunjungan lapangan. Masalah tersebut meliputi proyek-proyek fisik yang tidak selesai di Distrik Masni atau pendidikan yang memprihatinkan di Distrik Amberbaken dan Kebar.

12 Mei

Kapolresta Jayapura, Moch Son Ani, dipecat dari jabatannya karena dinilai tidak bisa mengendalikan massa dalam kerusuhan 10 Mei di Abepura. Penggantinya adalah AKBP Paulus Waterpauw. Sementara itu, kepada pers, AKP Novly Pitoy, berkeyakinan bahwa dirinya sudah menjalankan protap dalam menangani massa.

Korban peristiwa kebrutalan polisi 10 Mei mendatangi kantor perwakilan Komnas HAM di Jayapura untuk meminta Komnas HAM segera memeriksa pelaku kekerasan tersebut. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Perwakilan Komnas HAM, Albert Rumbekwan, mengatakan pihaknya telah membentuk tim yang akan bekerjasama selama sebulan untuk mengumpulkan data juga melakukan koordinasi dengan pihak terkait terutama Polda Papua, Kapolresta Jayapura, Kasat Serse Polresta, Danru, juga Jaksa Penuntut Umum serta hakim yang menangani kasus Filep Karma dan Yusak Pakage.

Salah satu balon Bupati Tolikara, Ir Silas Kogoya Msi mengeluarkan pernyataan pers yang menyatakan bahwa seluruh elemen masyarakat Tolikara dari 10 distrik menyampaikan aspirasi ke KPUD untuk mendukung dirinya karena dinilai sebagai salah satu putra terbaik Tolikara.

14 Mei

Dalam kunjungannya ke Jayapura, Kapolri Jen Pol. Da'i Bachtiar menduga bahwa ada pihak tertentu yang menunggangi peristiwa 10 Mei di Abepura. Karena itu pihaknya telah memerintahkan Kapolda untuk menyelidik serta memproses dalang aksi perusakan tersebut. Kedatangan Kapolda ini juga disambut dengan demo oleh kaum korban di depan kantor Kontras Papua.

9 polisi yang diduga terlibat dalam insiden kebrutalan polisi 10 Mei dinyatakan bersalah dan dikurung selama 21 hari serta dimutasi dengan turun pangkat. Mereka itu adalah Brigadir Ibrahim Hadi, Briptu W. Panjaitan, Briptu Arnold, Briptu Jekson, Briptu Tamsir, Briptu Mateus, Bripda Nimrot Sroyer, Bripda Dena dan Bripda Arie Afandi.

Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, FX Soegiarto SH, menyatakan kepada pers bahwa pihaknya telah meminta Polresta Jayapura untuk memberikan bantuan pengamanan khusus saat diadakan Sidang Lanjutan Perkara Makar Filep Karma dan Yusak Pakage minggu depan.

16 Mei

22 dari 24 warga sipil yang sempat ditahan di Polresta Jayapura akibat kerusuhan 10 Mei dipanggil lagi oleh Polresta Jayapura untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam bentrokan tersebut.

Panglima TNI, Jend. Endriartono Sutarto, menandatangani surat no. SKEP/191/V/2005 tertanggal 16 Mei 2005 mengenai mutasi 57 perwiranya, termasuk Pangdam XVII/Trikora, Mayjen. TNI Nurdin Zainal, yang akan digantikan oleh George Toisutta.

17 Mei

Sidang lanjutan Filep Karma dan Yusak Pakage ditunda karena Penasihat Hukum belum menyiapkan pembelaan dan menuntut agar Hakim A. Lakoni diganti. Tuntutan ini berdasar atas dugaan kuat bahwa hakim tersebut terlibat dalam penganiayaan mahasiswa saat terjadi bentrokan tgl. 10 Mei yang lalu.

Danrem 172/PWY menyatakan kepada pers bahwa pihaknya telah berhasil menangkap Marten San San, Simson Tonjau dan Baldus Tiris yang dianggap sebagai tokoh TPN/OPM Marvic. Mereka ditangkap oleh Satuan Tugas Rajawali Yonif 753/AVT di Daerah Kali Kuitor, antara Kampung Takar dan Benerap, Distrik Pantai Timur (Kabupaten Sarmi). Mereka ditangkap tanpa perlawanan beserta barang bukti yang berupa: 2 pucuk senjata jenis Mouser, 79 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 buah bendera Bintang Kejora, 15 butir amunisi kaliber 7,62 mm dan barang-barang lain seperti 2 handuk ABRI.

18 Mei

Ketiga orang yang dinyatakan sebagai tokoh OPM oleh Korem 172/PWY diserahkan kepada pihak Polres Jayapura untuk dilakukan proses penyelidikan dan diduga kuat melakukan tindak pidana makar yang dapat dikenai hukuman penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun.

Puluhan warga yang menjuluki dirinya Forum Intelektual dan Maysarakat Peduli Pembangunan Kabupaten Jayapura Bersatu (FIMPPKJB) melakukan unjuk rasa damai ke kantor Gubernur Dok II Jayapura. Mereka menuntut agar Gubernur menarik surat izin pemeriksaan dan penyidikan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Yustus Nisaf atas kasus pidana pemukulan.

19 Mei

Marthen San San yang ditangkap oleh Korem 172/PWY di Sarmi dan dituduh OPM mulai diperiksa oleh Polres Jayapura. Pihak Polres menyatakan bahwa tersangka mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Korem adalah miliknya.

Para pegawai melakukan pemalangan terhadap kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jayawijaya, Bawasda, dan Dinas Pariwisata karena hak-hak mereka tidak dibayarkan sejak tahun 2001.

Marthen Ferry Kareth, Ketua KPU Provinsi Papua, menyatakan kepada publik bahwa 10 orang anggota KPUD kabupaten/ kota diduga berpihak pada salah satu Parpol atau calon tertentu. Pihaknya akan mengeluarkan peringatan yang dapat berlanjut pada pemecatan jika hal ini ditanggapi serius oleh yang bersangkutan.

Dalam upacara perpisahan, mantan Kapolresta Jayapura, AKBP Moh Son Ani, yang dicopot dari jabatannya karena peristiwa 10 Mei, mengutarakan permintaan maaf kepada masyarakat jika pelaksanaan tugasnya tidak memuaskan.

20 Mei

PGGP mengeluarkan seruan terbuka kepada publik berkaitan dengan PILKADA guna menyerukan agar PILKADA berjalan damai dan jujur. Masyarakat dihimbau menggunakan akal sehat dan hati nurani mereka dalam memilih calon bupati/ walikota dan wakilnya.

Marthen Ferry Kareth, Ketua KPU Provinsi Papua, menyatakan kepada publik bahwa KPU siap melaksanakan PILKADA pada tgl. 28 Juni asalkan pemda-pemda menyediakan dana yang mencukupi. Jika tidak demikian, pihaknya dapat mengundurkan PILKADA.

Sejumlah tokoh Gereja Papua, seperti Pdt. Hermann Saud dan Pdt. Lipiyus Biniluk mengaku bahwa pihaknya tidak dilibatkan dalam sosialisasi pembentukan MRP meski sudah menemui Gubernur JP. Solossa guna meminta informasi yang lebih terperinci mengenai rencana tersebut.

21 Mei

Warga pendukung pasangan calon walikota, Jan Hendrik Hamadi dan Bangun Manurung, mengadakan demo ke KPUD Kota Jayapura guna memprotes keputusan KPUD yang menggugurkan pasangan tersebut dalam tahap verifikasi.

22 Mei

Sekretaris KPUD Raja Ampat, Wellem Mambrasar, menyatakan pihaknya sedang menunggu pencairan dana Otsus sebesar Rp. 4 milyar dari Pemerintah Provinsi Papua untuk pelaksanaan PILKADA.

23 Mei

Penasihat hukum Filep Karma dan Yusak Pakage mengancam tidak akan membacakan pledoi jika majelis hakim yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan terhadap mahasiswa pendemo tgl. 10 Mei lalu tidak diganti. Sebelumnya di kantor LBH Papua, ditemukan kepala anjing dengan tulisan "Petrus dan Paskalis, ini contoh kepalamu. Dari warga NKRI".

Ratusan massa pendukung pasangan Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Ir. Bangun Manurung kembali melakukan demo di kantor KPU Kota Jayapura. Massa melakukan orasi guna memaksa KPU agar menerima calon mereka. Terjadi perundingan yang menegangkan antara pendemo, KPU Kota Jayapura, KPU Provinsi Papua dan Kapolresta Jayapura.

Pejabat Gubernur IJB, Abraham O Atururi, menyatakan kepada pers bahwa pelaksanaan PILKADA ditunda 30 hari dari waktu yang ditetapkan karena KPUD belum mendapatkan mandat dari DPRD IJB. Pihaknya menyatakan bahwa hal tersebut tidak perlu menunggu terbentuknya MRP, "Untuk apa menunggu terbentuknya MRP sementara ada aturan yang menjelaskan. Dalam UU No. 32/2004 dan PP No. 6/2005 sangat jelas. Lagipula MRP bukan untuk IJB tetapi hanya untuk Papua".

Ketua DPR-RI, Agung Laksono, berkunjung ke Manokwari bersama anggota DPR-RI lain dari Partai Golkar, seperti Yorrys Raweyai dan Simon P. Morin. Dalam kesempatan kunjungan ke Distrik Warmare untuk mencanangkan penanaman padi, Agung Laksono dinobatkan sebagai Kepala Suku Besar Arfak, Doreri dan Wamesa.

24 Mei

Socratez Sofyan Yoman, Ketua Sinode Baptis di Papua, meluncurkan buku Orang Papua bukan separatis yang mengupas Perjanjian New York 15 Agustus 1962.

Daniel Buriyam (23 tahun) yang mengaku sebagai anak buah Hans Yoweni di Distrik Bonggo dan Kaureh menyerahkan diri kepada polisi dengan permintaan agar Bupati Jayapura, Habel Suwae, menjemputnya di Kaureh sehingga mendapat jaminan keamanan dan tidak diproses secara hukum.

25 Mei

Dalam kunjungannya ke Jayapura Dubes Australia untuk Indonesia, David Ritchie, menjelaskan bahwa pihaknya sangat mendukung kebijakan Otsus di Papua dan diharapkan kebijakan tersebut dapat menyelesaikan permasalahan di Papua. Pihaknya dengan tegas menyatakan tidak mendukung usaha separatis di Papua.

Pasangan Balon walikota dan wakil walikota periode 2005-2010, Kambu-Sujarwo, dilaporkan ke PanwasPILKADA oleh John Sawaki SH karena dituduh mencuri start kampanye di Koya Timur, Distrik Muara Tami, dengan membagikan Rp. 500.000 kepada setiap orang yang hadir dalam penyampaian visi dan misi balon.

26 Mei

Filep Karma dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan hukuman tambahan dengan pencabutan statusnya sebagai PNS oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Iksan SH dibantu Siswatmono Radianoro SH dan A. Lakoni Hernie SH. Hukuman itu lebih berat 10 tahun daripada tuntutan jaksa. Sementara itu Yusak Pakage dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.

Ketua DPD Partai Golkar IJB, Daud Mandowen, menyatakan bahwa partainya telah menyiapkan 6 pasangan bupati/ wakil bupati di 6 kabupaten di Provinsi IJB yang akan melaksanakan PILKADA. Dukungan yang sama juga akan diberikan kepada Bupati Manokwari sekarang, Dominggus Mandacan, yang akan mencalonkan diri dalam PILKADA Kabupaten Manokwari akhir 2005.

Fak-fak	: Drs. Musa Kamudi Msi – Drs. Donatus Nimbikendik
Kaimana	: Frans Amerbay SE – Ismail Sirfefa S.Sos
Teluk Bintuni	: Decky Kawab SH MH – Azies Bauw SH MM
Teluk Wondama	: Drs. Albert H. Torey MM – Maritje Kaikatui
Raja Ampat	: Daoem Daat SE – M. Yasin Helmi Ihamahua SE MM

Ketua DPRP, John Ibo, mendesak pemerintah daerah agar segera melakukan sosialisasi MRP kepada masyarakat sebab jika hal ini tidak segera dilakukan, dikhawatirkan akan timbul konflik di tengah masyarakat saat dibentuk. "Saat ini sosialisasi MRP volumenya kecil sekali, hanya dilakukan saat ada kunjungan gubernur ke beberapa daerah dan itu bersifat singkat saja, tidak seperti yang diinginkan oleh masyarakat".

27 Mei

Kapolres Manokwari, AKBP Drs. Dedi Kusnadi, dan Bupati Mandacan, mendatangi Kampung Hanghow yang sedang berselisih dengan Kampung Masabui menyusul terjadinya pembunuhan terhadap Moses Saroi, warga Kampung Masabui. Keduanya berusaha mencegah terjadi tindak balas dendam dari warga Kampung Masabui kepada Kampung Hanghow yang tengah mengalami ketakutan atas kemungkinan itu.

KPU Kota Jayapura didemo dua kali dalam satu hari oleh dua kelompok massa dengan agenda yang berbeda. Massa pertama datang pagi hari tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Port Numbay yang meminta agar KPU memeriksa bakal calon yang terlibat KKN dan *money politics*. Kelompok massa kedua yang berjumlah ratusan adalah pendukung pasangan Hamadi dan Manurung yang memaksa agar KPU meloloskan pasangan ini sebagai salah satu pasangan calon walikota Jayapura. Menanggapi demo kedua, Ketua KPU, La Pona menyatakan akan melakukan konsultasi dengan gubernur saat diadakan pertemuan antara gubernur dengan KPU-KPU.

Menanggapi vonis Pengadilan 15 tahun penjara bagi Filep Karma dan Yusak Pakage, Koordinator Kontras Papua, Pieter Ell, menyatakan bahwa hal itu sangat diskriminatif dan tidak menjamin bahwa besarnya vonis hakim akan menyelesaikan akar persoalan yang ada di masyarakat Papua.

29 Mei

Menanggapi rencana KPU Kota Jayapura untuk membawa tuntutan masyarakat agar pasangan calon Drs. Hendrik J. Hamadi dan Bangun Manurung sebagai calon walikota Jayapura, Gubernur Papua, JP Solossa, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengintervensi kerja KPU karena Gubernur tidak memiliki kewenangan untuk menangani masalah pencalonan PILKADA. Hal itu harus diselesaikan oleh Parpol yang bersangkutan dan KPU.

30 Mei

Dalam rakerda PILKADA, 14 pejabat bupati dan walikota menyatakan rasa optimis untuk melaksanakan PILKADA tgl. 28 Juni 2005. Meski demikian, pejabat bupati Tolikara, Drs. Frans Kristantus, mengatakan bahwa kondisi politik dan keamanan belum terlalu terjamin sehingga telah dikerahkan 100 orang anggota Polres Persiapan Tolikara, 36 orang anggota Koramil, 32 orang BKO Brimob, 32 orang anggota Kostrad, dan 408 orang anggota Linmas ke Tolikara.

Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) KPU se-IJB pada Senin, 30 Mei di Hotel So ribo yang dipimpin Ketua KPUD IJB Ny Regina Sauyai, gagal menetapkan jadwal pilkada bersama sesuai yang ditawarkan pada tanggal 28 Juli mendatang, karena ditentang sejumlah KPUD, terutama Kabupaten Sorsel, Kaimana, Fakfak dan Manokwari yang ternyata sudah melakukan tahapan penjurian bakal calon kepala daerah (balon

bupati/wabup) karena berpatokan pada jadwal yang sebelumnya sudah ditetapkan bahwa pilkada dilaksanakan tanggal 27 Juni.

31 Mei

Ketua KPU Kota Jayapura, Dr. La Pona, menyatakan bahwa pihaknya batal menetapkan pasangan calon-calon PILKADA karena kantor KPU terus diduduki massa pendukung pasangan Hamadi dan Bangun Manurung sehingga KPU merasa tidak aman.

Penjabat Bupati Pegunungan Bintang Drs. H Zubeir D Husein di Jayapura, mengemukakan bahwa setelah melewati tahapan verifikasi, ahirnya hanya empat pasangan yang lolos, yakni [1] Drs. Welingthon Wenda, M.Si dan Theodorus Sitokdana diusung Partai Golkar; [2] Enos Kalakmabin dan Fredy Palege diusung gabungan 9 Parpol; [3] Engelbertus Kasipmabin dan Robinhood Ratuntiga, SH. MA, diusung PPD ; [4] Drs. Wellem J Keiya dan Drs. Aloysius Kambana diusung PDI-P, Partai Demokrat dan PAN. Bupati mengatakan dana diperoleh dari Dana Otsus Rp 5 miliar dan dari DAU Rp 7 miliar sehingga totalnya Rp 12 miliar. Dari total ini, sebagian dana untuk biaya keamanan, honor petugas linmas, dan kebutuhan logistik seperti : 412 buah kotak suara, 41.098 lembar kertas suara, 39.517 formulir pemilih, dan 102 botol tinta. Jumlah pemilih 39.517 orang dari total penduduk 68.878 orang dengan jumlah distrik 10, dan 10 Panitia Pemilihan Daerah (PPD), serta 91PPS, dan 206 buah TPS.

Kasubag Program KPUD Kabupaten Merauke Fery Ohoitimur menilai bahwa dana pelaksanaan Pilkada Kabupaten Merauke masih minim, apalagi jika memperhatikan faktor geografis di beberapa distrik dan biaya yang cukup tinggi dalam mendistribusikan logistik Pilkada maka, KPUD akan meminta tambahan dana ke Pemerintah Kabupaten Merauke sebesar Rp 2,4 miliar dan berharap Pemerintah Daerah dan DPRD menyetujinya, karena sesuai alokasi dana dalam APBD seharusnya KPUD menerima dana sebesar Rp 7,5 miliar, namun saat ini hanya menerima sebesar Rp 5,03 miliar.

Anggota KPUD IJB, Lukas Burung, mengatakan bahwa semua kabupaten/kota, termasuk Sorsel, Kaimana dan Fakfak akan melakukan pilkada secara serentak pada tanggal 29 Juni. " Semua akan digelar secara serentak. Ketua KPUD IJB, Ny. Sauyai mengatakan bahwa jadwal yang sebelumnya ditetapkan tanggal 27 Juni 2005 ternyata mengalami kendala, diantaranya masalah pembiayaan dan belum adanya surat pemberhentian kepada Pejabat Gubernur IJB AO Atururi.

1 Juni

Pangdam XVII/Trikora, Mayjen TNI Nurdin Zainal, MM, meresmikan berdirinya Korem 174/Anim Ti Wanninggap (ATW) di Merauke sebagai upaya memperkuat Kodam sekaligus melantik Kolonel Infantri Kitaran Joy Sihotang selaku Danrem 174/RW yang pertama.

Sekretaris KPU Kota Jayapura yang juga sekretaris Pokja pendaftaran calon Dierik Kabarek, SE, mengatakan bahwa sesuai hasil pleno yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 5/KPUD/Pilkada/KJ/2005 tentang penetapan pasangan calon kepala daerah (KDH) dan wakil kepala daerah (WKDH) Kota Jaya[ura tahun 2005, pasangan yang lolos sebagai calon KDH dan WKDH Kota Jayapura 2005 adalah MR Kambu/H. Sudjarwo, JI Renjaan, SH/H. Arobi Ahmad Aituarauw, Ir Rustan Saru, MM/Otniel Meraudje, SE, MM dan pasangan Musa Jan Jouwe/Nuralam.

Massa pendukung Drs Jan Hendrik Hamadi dan Ir Bangun Manurung, M.Plan tidak puas atas keputusan KPUD yang tetap menetapkan 4 calon WaliKota Jayapura periode 2005-2010 sehingga mereka melakukan pemblokiran jalan depan rumah Keondoafian Port Numbai (samping CV Tomas Entrop) dengan menggunakan kayu, drum dan membakar ban bekas serta meneriakkan kata-kata seperti, "Ganti La Pona sebagai Ketua KPUD Kota Jayapura, kinerjanya kurang beres dan tidak menyikapi aspirasi masyarakat Port Numbai." Aksi ini dimulai sejak Pk. 19.00 dan berakhir pada Pk. 01.00 dini hari setelah massa mendengar pengarahannya dari Drs Jan Hendrik Hamadi yang didampingi Ir Bangun Manurung. Dalam pengarahannya itu, Jan Hamadi mengatakan, bisa memahami ketidakpuasan massa, namun dia meminta massa untuk membuka pemblokiran terhadap jalan umum tersebut. "Soal ketidakpuasan terhadap KPUD, masih ada waktu. Kalau perlu kita tempuh jalur hukum," sambung Hamadi. Sedangkan untuk menangani pemalangan tersebut, Polisi menurunkan 1 SSK Dalmas dari Polresta serta satu Kompi Brimob Polda Papua, sementara itu Wakapolda Papua Brigjen Polisi Drs FA Purwoko juga langsung turun untuk memantau perkembangan lapangan dengan didampingi Kapolresta Jayapura AKBP Paulus Waterpauw.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Keerom akhirnya mengumumkan nama-nama pasangan calon. Sesuai nomor urut adalah sebagai berikut : Drs Ikram Baasalem, MM dan Oktovianus Gusbager, S.Sos ; Yusuf Wally, SE, MM dan H Budi Setyanto, SH ; Drs Billy Wilhelmus Jamlean dan H Thamsul Makkawaru ; Drs Darius Izak Danya dan Ir Ruben Kombonglangi, MM ; Drs Celcius Watae dan Drs Waghfir Kosasih, SH.

2 Juni

"Operasi-operasi razia mulai diintensifkan khususnya pada malam hari. Ini merupakan bagian dari Operasi Cipta Kondisi, yang disiapkan baik oleh Polda Papua, Polresta Jayapura dan melibatkan Koramil, Kodim dan Korem dalam sebuah Rencana Pengamanan (Renpam) untuk menyikapi kemungkinan meningkatnya gangguan Kamtibmas, berkaitan dengan proses pelaksanaan pilkada," jelas Kapolresta Jayapura, AKBP Paulus Waterpauw.

DPRD IJB mengeluarkan surat bernomor 160/50/DPRD/IJB-2005 tertanggal 30 Mei 2005 yang menjelaskan bahwa masa jabatan Pjt Gubernur IJB OA Atururi akan berakhir 13 Juni 2005. "Maka bersama ini kami beritahukan, bahwa masa jabatan Pejabat Gubernur Irian Jaya Barat berakhir 13 Juni 2005," demikian salah satu kalimat dalam surat pemberitahuan yang ditandatangani Ketua DPRD IJB, Jimmy Demianus Ijie.

Setelah tertunda selama enam bulan, Ketua Pengadilan Negeri Wamena, Purwadi, SH, M.Hum melantik dan mengambil sumpah janji ketua dan wakil ketua terpilih DPRD Kabupaten Jayawijaya periode 2004-2009. Acara tersebut dilaksanakan dalam sidang Istimewa DPRD Kabupaten Jayawijaya. Mereka yang dilantik adalah Ketua DPRD Yance Ferry Kogoya, Wakil ketua I Budiman Kogoya dan wakil ketua II Pdt. Saul Elopere.

3 Juni

Ketua KPU Kota Jayapura DR La Pona, M.Si yang didampingi Sekretaris KPU Kota Jayapura Diedrik Kbarek, SE, mengungkapkan bahwa pejabat KPU Kota Jayapura beberapa hari ini diteror oleh orang tak dikenal melalui telepon rumah maupun telepon seluler (HP). Ancaman ini khususnya ditujukan kepada para pengambil kebijakan yakni Ketua KPU DR La Pona, M.Si, Sekretaris Diedrik Kbarek, SE, Anggota Jerry Numberi dan Pdt. Mien Ayamiseba, Sth.

Seusai penyelenggaraan Komunikasi Sosial dengan Ikatan Paguyuban/Etnis se-Garnisun Jayapura, di Aula Kasuari Makodam XVII/Trikora, Pangdam XVII/Trikora Mayjen TNI Nurdin Zainal MM menegaskan bahwa Kodam lebih memperhatikan netralitas dalam kaitannya dengan Pilkada. Dan pihaknya sudah memerintahkan jajarannya agar bersikap netral dan tidak boleh memihak pada salah satu calon.

Ketua DPRD IJB, Jimmy Demianus Ijie kepada pers mengatakan bahwa pemerintah dan DPRD IJB telah mengusulkan tiga nama ke presiden melalui Mendagri untuk menggantikan AO Atururi sebagai pejabat gubernur IJB. Tiga orang tersebut adalah pejabat Depdagri yang selama ini punya andil besar terhadap eksisnya Provinsi IJB, yakni Progo Nurjaman (Sekjen Depdagri), Dr S Situmorang (Dirjen Pemerintahan Umum Depdagri), dan Ir Timbul Pujiyanto (Staf Ahli Mendagri).

4 Juni

Sebagai tindak lanjut laporan secara lisan maupun tertulis yang diperoleh dari masyarakat, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwas-pilda) Kabupaten Merauke, memanggil sejumlah PNS maupun pejabat negara yang diduga terlibat dalam mendukung salah satu cabub/cawabub Kabupaten Merauke periode 2005-2010.

Kebijakan Pemprov Papua untuk mencairkan dana awal Pilkada sebesar Rp 1 milyar disambut baik KPUD-KPUD. Ketua KPUD Supiori Yosef Mansawan mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk membiayai pengadaan logistik Pilkada bagi Kabupaten Supiori sebesar Rp 89 juta. Menurut Yosef, dari dana itu, Rp 20.692.000 akan dipakai untuk pengadaan formulir Rp 55.222.500 untuk pengadaan surat suara dengan jumlah pemilih 7000-an ditambah 2,5 persennya.

Seperti diungkapkan oleh Ketua KPUD Supiori Yosef Mansawan, meski saat ini KPUD Supiori belum menetapkan daftar pemilih tetap dalam pilkada, namun pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya mobilisasi penduduk dari Kabupaten Biak Numfor ke Kabupaten Supiori untuk kepentingan pilkada. Oleh karena itu, KPUD Supiori akan melakukan pengecekan ulang di lapangan dan akan berkoordinasi dengan Panwasda Supiori untuk mengambil langkah-langkah antisipatif.

8 Juni

West Papua New Guinea National Congress (WPNGNC) menyerukan kepada masyarakat dan pemerintah Vanuatu agar mengambil tindakan tegas terhadap Andy Ayamiseba, perwakilan PDP, dan Dr. John Ondowame, perwakilan OPM. "Dua orang tersebut seharusnya dideportasi ke Indonesia. Klaim John Ondowame selaku wakil resmi OPM dulu dan kini adalah omong kosong belaka".

18 Juni

Ketua Umum Golkar Yusuf Kalla tiba di Jayapura.

20 Juni

KASAD, melakukan serah terima jabatan Pangdam XVII/ Trikora dari Mayjen TNI Nurdin Zainal kepada Mayjend TNI George Toisutta.

21 Juni

Moderator PDP, Willy Mandowen, menyatakan bahwa rakyat Papua tidak mengakui apa yang disebut West Papua New Guinea Congress yang telah memusuhi kedua tokoh Papua. PDP menyatakan bahwa tuduhan tersebut samasekali tak beralasan. Mandowen

menegaskan bahwa organisasi yang sah mewakili rakyat Papua adalah PDP. "Andy Ayamiseba dan Otto Ondowame telah ditunjuk oleh PDP untuk melakukan diplomasi atas nama rakyat Papua sehingga tidak ada seorangpun atau organisasi manapun berhak berkomentar kepada kedua saudara ini".

22 Juni

DPRD Provinsi Papua secara resmi diubah menjadi DPR Papua.

24 Juni

Badan Eksekutif Mahasiswa Papua se-Indonesia melakukan aksi demo di Kantor Mendagri di Jakarta menuntut agar kasus korupsi di Papua ditangani tuntas. Dijanjikan dibentuk tim penyelidikan untuk Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nabire dan Provinsi Papua.

Yorrys Raweyai, mantan pemimpin Pemuda Pancasila, mendaftarkan diri sebagai kandidat gubernur IJB bersama Abdul M. Killian sebagai pasangannya. Mereka didukung oleh Partai Golkar dan dua partai kecil lainnya.

B. HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

1 April

Direktur Reskrim Polda Papua, Kombes Pol. Drs. M. Situmorang, membenarkan adanya pengaduan atas kasus dugaan korupsi Rp. 100 milyar yang diduga dilakukan oleh Bupati Jayawijaya, Drs. David Hubi. Laporan pengaduan tersebut tercatat di Polda Papua dengan No. Pol: LP/26/III/Dir Reskrim tanggal 15 Maret 2005 tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana APBD Tahun Anggaran 2003/2004 dan Surat Gubernur Papua: 356/469/SET tanggal 28 Februari 2005 tentang pelimpahan kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi.

Menanggapi nasib 4000 karyawan PT Henrison Iriana yang dirumahkan, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sorong, Yohanes Lermatin, berpendapat bahwa langkah meliburkan karyawan karena kehabisan stok kayu adalah hal biasa dan diharapkan perusahaan akan memproduksi lagi setelah Operasi Hutan Lestari II selesai.

DPRD Kabupaten Sarmi menetapkan APBD 2005/2006 Kabupaten Sarmi sebesar Rp. Rp. 150.563.436.380 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun anggaran 2004/2005 sebesar 125.669.519.361. Dari jumlah tersebut dana publik mendapat jatah sekitar Rp. 88 milyar sementara belanja aparatur negara sekitar Rp. 62 milyar.

3 April

Untuk memberdayakan perekonomian masyarakat, Pemerintah Provinsi Papua yang diwakili Gubernur Papua, Drs JP Salossa M.Si dengan Bank Papua yang diwakili Direktur Utama, Onesius Fairyo, melakukan penandatanganan MoU tentang dana penjaminan untuk kredit tahap kedua sebesar Rp 10 milyar yang akan disalurkan ke 11 kantor cabang Bank Papua. Menurut Onesius Fairyo, perhatian pemerintah untuk hal ini cukup besar dengan total Rp 15,5 milyar, dimana tahun 2004 dana penjamin yang diberikan Pemprov melalui UKMK Center Bank Papua, sebesar Rp 5,5 milyar yang sudah disalurkan ke sektor usaha di tiap kabupaten, ada kabupaten yang mendapat Rp 500 juta dan ada yang Rp 1 milyar.

Bupati Kabupaten Nabire Drs. A.P.Youw mengatakan Pemkab Nabire berkeinginan kuat untuk membangun gedung DPRD baru di Bumi Wonorejo, setelah beberapa waktu lalu gempa memporak-porandakan gedung DPRD yang baru saja selesai dibangun di bekas Stadion Siriwini. Untuk pembangunan gedung ini, sudah diposkan dana Rp 18 milyar dari APBN. Sementara itu Pimpinan PT Nidya Karya Ir. Hendrik Gunawan, sebagai pihak yang mengerjakan pembangunan kantor itu mengatakan bahwa direncanakan tahun ini gedung DPRD yang dibangun diatas tanah seluas 200 x 200 M2 tersebut rampung. dengan total anggaran yang digunakan sebesar Rp 17.700 milyar.

4 April

Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, H Hery Supriyono SH, M.Hum mengatakan bahwa direncanakan tanggal 5 April 2005 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Irian Jaya Barat Ir. ML Rumadas tersangka *illegal logging* mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Manokwari.

Adanya indikasi korupsi dilingkungan DPRD Papua yang dilaporkan setahun lalu oleh Gim Parangin mantan anggota DPRD, masih ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Papua. Statusnya saat ini telah meningkat dari penelitian ke tahap penyelidikan namun sayangnya, dewan dianggap tidak koperatif dan terkesan menutup-nutupi masalah tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Papua Sendjun Manulang, SH, "Kami sudah menghadap Ketua Dewan, awalnya beliau mau menerima, tapi waktu kembali malah katanya harus minta ijin ke Gubernur. Parahnya lagi melalui sekwan, soal keuangan dewan harus ditanya ke Biro Keuangan Setda Provinsi Papua. Ini kan malah menyulitkan kita. Memang bukan suatu halangan tapi tetap saja dilempar sana sini, " ungkapanya."

Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Jayapura Malikidin Soltief SE, mengatakan bahwa larangan dari pemerintah melalui dinas pendidikan agar sekolah tidak melakukan pungutan biaya UAN kepada siswa sesungguhnya adalah hal yang amat sulit untuk dilakukan. Untuk itu ia mengharapkan agar pemerintah khususnya instansi terkait tidak mengeluarkan statemen yang meresahkan sehingga masyarakat tidak membangun opini yang menyudutkan sekolah. karena bantuan yang diberikan pemerintah sejauh ini, umumnya tidak cukup. Dia memberikan contoh bahwa di SMK yang dipimpinnya, kebutuhan tiap anak untuk ujian praktek sebesar RP 300.000 dan belum lagi ditambah kebutuhan ujian teori, sementara bantuan yang diberikan hanya Rp 110.000.

Kejaksaan Negeri Merauke memanggil 3 orang mantan anggota DPRD Merauke periode 1999-2000 yang terkait dengan penyalahgunaan uang negara tahun 2002 sebesar RP 4,9 miliar lebih. Kajari Merauke Eddy Soetiyono, SH kepada pers mengatakan bahwa dengan dipanggilnya 3 orang ini maka keseluruhannya sudah 8 orang yang dipanggil. Di antaranya adalah empat orang anggota dewan termasuk sekwan yang sudah tidak aktif, sambil menunggu ijin gubernur untuk memeriksa mereka yang masih aktif.

5 April

Gubernur Provinsi Papua Drs. JP Solossa M.Si di Sasana Karya Kantor Gubernur, menyerahkan alokasi pembagian dana Otonomi Khusus (otsus) dalam bentuk penandatanganan nota kesepakatan antara Gubernur Provinsi Papua dan para bupati/walikota. Namun ada 7 kabupaten dari Provinsi Irian Jaya Barat yang bupati maupun wakilnya tidak datang: Kabupaten Manokwari, Teluk Wondama, Bintuni, Sorong Selatan, Fakfak, Kaimana, Rajaampat. Dana Otsus untuk tahun 2005 sebesar Rp

1.775.312.000.000. Setelah dikurangi biaya pembentukan MRP, pelaksanaan Pilkada, peningkatan tipe RSUD Dok II dan Rumah Sakit Abepura maka, sisa dana sebesar Rp 1.425.000.000.000 akan dibagi untuk program pembangunan di tingkat Provinsi Papua dan 29 kabupaten/kota yang ada di Papua. Bagian untuk Provinsi 40% dari sisa tersebut atau sebesar Rp 570 miliar dan kabupaten/kota 60% atau sebesar Rp 855 miliar. Gubernur menjelaskan bahwa dana Rp 855 miliar tersebut akan dibagikan ke 29 kabupaten/kota berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan, dengan variabel yang menjadi patokan bagi porsi masing-masing kabupaten/kota yakni, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, besarnya DAU, RDRB, PAD, dan tingkat kesulitan daerah. Dana Otsus ini untuk membiayai program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pembangunan infrastruktur serta program-program prioritas penunjang dari masing-masing kabupaten/kota yang akan ditunjang dengan dana SKO (satuan kegiatan operasional). Dan tujuh kabupaten yang belum menandatangani nota kesepakatan, gubernur katakan bahwa mereka diberi kesempatan dalam waktu 1 bulan namun kalau mereka tetap tidak datang untuk mengambilmnya maka, dengan sendirinya dana tersebut tidak akan cair.

Ketua Tim Pansus *illegal logging* DPRP Komaruddin Watubun mengakui bahwa dirinya bersama Wakil Ketua tim Pansus Ir. Weynand Watori, telah mengadakan pertemuan dengan Menhut MS Kabaan, berkaitan dengan rencana pelelangan kayu hasil sitaan oleh Dep. Kehutanan. Dalam pertemuan itu (3/4), Pansus mengusulkan agar 60% dari hasil lelang itu dikembalikan kepada rakyat Papua, dan keinginan itu sudah disetujui oleh Menhut. Hal lain yang diajukan pansus yakni agar membebaskan pengelolaan kayu lokal guna menunjang pembangunan dan kebutuhan kayu bagi masyarakat di Papua dan pelelangan kayu diprioritaskan kepada mereka yang memiliki izin industri di Papua seperti PT Wapoga dan lainnya sehingga tenaga kerja yang saat ini dirumahkan dapat menjalankan tugasnya kembali. Dan usulan ini akan disampaikan oleh Menhut dalam rapat kabinet.

Kepala Dinas Kehutanan/Pertanian/Perkebunan dan Perikanan Provinsi Irian Jaya Barat, Ir ML Rumadas M.Si, mulai menjalani sidang terkait dengan dugaan kasus *illegal logging* di Pengadilan Negeri Manokwari dengan agenda pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arie Sudihar SH, M.Hum. dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim I Putu Gede Hariadi SH sedangkan sebagai hakim anggota yakni Maria M Sitanggang SH dan Benyamin SH. Dalam surat dakwaannya, JPU mendakwa Rumadas dengan pasal berlapis yakni pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) UU No. 41/1999 tentang kehutanan jo pasal 56 ke-1 KUHP dan dakwaan subsider pasal 50 (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) UU No. 41/1999 tentang kehutanan jo pasal 56 ke-2 KUHP. Dari isi dakwaan itu, Rumadas di dakwa secara bersama-sama dengan Ir M Tadeus selaku Manager PT Yotefa Sarana Timber dan Ronny Rumalutur S.Hut (Direktur Dikli Atidas Papua) telah dengan sengaja melakukan kegiatan penebangan liar atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang yakni pada bulan April-September 2004 di sekitar jalan Pranoto Km 23 hingga Km 28 Kampung Manimeri dan Tuhijer, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari memutuskan status tahanan kota bagi terdakwa berdasarkan permohonan terdakwa melalui kuasa hukumnya kepada Majelis Hakim, dengan ketentuan Majelis Hakim No. 34/Pen.Pit/2005/PN Mkw. Dan sebagai jaminan yakni Gubernur IJB OA Atururi, Sarce Yarangga (Istri terdakwa), kuasa hukumnya, dan MN Kippu (salah satu staf terdakwa).

Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura (Ketua Tim JPU), Djabaik Haro Munthe SH, kepada pers di ruang kerjanya mengatakan bahwa, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Ir Marthen Kayoi MM yang terkait dengan dugaan kasus ilegal logging, sudah siap untuk disidangkan sebab surat dakwaannya sudah rampung dan rencananya Kamis (7/4) akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jayapura, kemudian tinggal menunggu penetapan Ketua Pengadilan menyangkut tanggal dan hari persidangan. Marthen Kayoi akan di dakwa dengan Pasal 50 ayat (3) huruf e dan j Jo Pasal 78 ayat (5) dan ayat (9) UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP. Dugaan kasus *illegal logging* yang terjadi di Wilayah Taja, Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura dan sebagai tersangka Direktur KS (inisial) PT Sejahtera Abadi Perkasa, kini mulai di sidik . sedangkan dua oknum anggota Pusat Pengendalian dan Operasi (Puskodalops) Polda Papua AKP SU dan Kopol HAR yang juga terlibat, saat ini sedang di tahan dan diperiksa oleh Provost Polda Papua. Sedangkan sesuai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) barang bukti yang berhasil di sita terdiri dari 5 unit traktor caterpillar D7G, 2 unit dump truck, 402 batang kayu log (bulat), 240 M3 kayu olahan. Hal yang menarik yakni bahwa KS, Direktur PT Sejahtera Abadi Perkasa ternyata 2 tahun lalu pernah ditahan juga karena kasus ilegal logging dan sampai disidangkan namun hakim saat itu memvonis dirinya bebas, lantaran saksi ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua kala itu mengatakan bahwa pengangkutan kayu menggunakan fotokopi SKSHH (surat keterangan sahnya hasil hutan) diperbolehkan berdasarkan kebijakan kepala dinas. Dan saat itu jaksa menyatakan kasasi.

Kasatgas Pam Operasi Hutan Lestari (OHL) II, Brikjen Hendarji S, kepada pers mengungkapkan bahwa setelah penahanan terhadap Wadan Sup-denpom XVII-II Sorong, Kapten Kaspar yang baru kemarin diperiksa dengan temuan barang bukti baru berupa 146 batang kayu, kini Tim OHL II mulai menyelidiki keterlibatan perwira di Jajaran Kodam XVII/Trikora, Kolonel RG (Kapuskopad) yang diduga terlibat kasus *illegal logging*. Pada kesempatan itu, Pangdam XVII/Trikora, Mayjen TNI Nurdin Zainal MM juga mengakui bahwa pihaknya telah memanggil Kolonel RG dan memerintahkannya ke Sorong; sedangkan berkaitan dengan soal keterlibatan SP mantan Kapuskopad XVII/Trikora, Kolenel (Pur) TNI AD, yang katanya sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), dibantah oleh Brigjen TNI Hendarji. Namun tentang isu keterlibatan mantan Dandim Manokwari, Hendarji mengatakan bahwa dugaan keterlibatan itu masih ditelusuri lewat PPATK (Pusat Pelaporan Anasalisa Transaksi Keuangan) dan untuk dugaan keterlibatan mantan Danlanal Sorong pun sedang diselidiki.

Seperti dikatakan oleh Kajari Biak Numfor Djoko Indra Setyawan, kasus dugaan korupsi dana bantuan bencana alam yang dikelola Dinas P dan P Biak Numfor hingga kini masih dalam penyelidikan pihak Kejaksaan Negeri Biak Numfor. Tim Penyidik yang diketuai Kasi Pidsus Hendry Prabowo, SH masih terus memanggil sejumlah saksi dan dari 32 saksi yang dipanggil: 10 orang saksi sudah dimintai keterangan, dimana dari 10 orang ini, sebagian besar adalah kontraktor.

Mayarakat di Kabupaten Biak Numfor mengalami kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah, karena itu masyarakat harus rela antri berjam-jam. Menurut pengakuan salah satu pangkalan pegecer, droping minyak tanah dari agen ke pengecer saat ini porsinya dikurangi, dan pendistribusiannya juga dijadwal. Hal ini dibenarkan oleh Nova, Staf Bagian Pemasaran pada Agen Minyak Tanah (ATM) Jasky Susanto, bahwa sejak Maret 2005 pihak Pertamina telah melakukan pembatasan kuota bagi para agen, di seluruh Papua.

6 April

Menanggapi ketidakhadiran para bupati dari 7 kabupaten di Provinsi IJB dalam Pengalokasian Dana Otsus dalam kegiatan Rakerda dan Musrenbang, Ketua DPRD IJB Jimmy Demianus Ijie mengatakan bahwa dirinya menyerahkan kepada masing-masing bupati tersebut, apakah dengan kepentingan Dana Otsus lalu mereka akan loyal kepada Pemprov Papua atau mereka peduli pada penderitaan rakyat di wilayah IJB ini. Namun dia berpesan agar dana Otsus tersebut jangan dijadikan alat untuk mengikat atau menciptakan ketergantungan para bupati di IJB. Senada dengan Demianus Ijie, Asisten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi IJB Drs. Jack Kapisa memberikan respon positif atas ketidakhadiran para bupati IJB itu karena sesuai dengan permintaan dirinya beberapa hari lalu menjelang kegiatan tersebut.

Menurut Kepala Bidang Pengendalian Pembangunan BP3D Provinsi Papua, karena ada peningkatan Dana Alokasi Umum Nasional (DAUN) pada tahun 2005 ini maka, Dana Otsus Papua juga mengalami kenaikan dibanding tahun 2004 lalu, sebab sesuai UU 34/2004 ayat (3) disebutkan bahwa dana Otsus itu setara dengan 2 % DAUN. Namun dalam distribusi ke masing-masing kabupaten/kota mengalami penurunan/sangat bervariasi, tergantung pada variabel yang digunakan sebagai tolak ukur. Misalnya, untuk Tahun Anggaran 2005 ini, Kabupaten Jayapura dan Sorong mendapat jumlah paling sedikit yakni sebesar Rp 27.100.000.000. sedangkan yang paling besar adalah Kabupaten Asmat dan Yahukimo yakni sebesar Rp 31.500.000.000

Meski telah diresmikan pada Januari 2005, namun hingga saat ini, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mega proyek Sub Terminal Mesran Kota Jayapura masih dipertanyakan. Dalam peninjauan proyek oleh Komisi C DPRD Kota Jayapura, Ketua Komisi C Ir. Junaidy Rahim menyatakan bahwa menurut laporan Kepala Dinas PU, proyek tersebut dibangun dengan dana Rp 17 miliar, sedangkan menurut kontraktor yang mengerjakan proyek ini, dananya antara Rp 14 hingga Rp 15 miliar saja.

Ir. Weynand Watori, salah seorang anggota panitia anggaran legislatif, menyatakan bahwa sehubungan dengan pembahasan RAPBD 2006 sejumlah catatan penting disampaikan panitia anggaran legislatif kepada panitia anggaran Pemprov (eksekutif) pada pertemuan yang berlangsung di ruang Panmus DPRP. Di antaranya, mereka mendesak agar eksekutif mau melakukan pertimbangan anggaran pelayanan publik dengan anggaran bagi aparatur.

7 April

Kasatgas Humas Tim Operasi Hutan Lestari II, Kombes Usman Saud Nasution mengungkapkan bahwa saat ini telah ditetapkan 108 tersangka. Yang ditahan 31 orang, 9 orang warga Malaysia, 1 warga Korea dan ada 8 orang masuk Daftar Pencarian Orang. Sedangkan barang bukti yang disita yakni 4 buah kapal, 34 unit mobil, 13 tongkang, 13 take board, 64 chainsaw, 64 ribu lebih batang kayu log dan 193 ribu lebih meter kubik kayu olahan.

Komisi C DPRD Kota Jayapura kembali mempersoalkan pembangunan gedung sekolah SMK 6 Abepantai yang dibangun Dinas P dan P Kota Jayapura secara swakelola. Menurut Kepala Dinas P dan P Kota Jayapura, Dra. WW Kambuaya, MM dana yang turun dari Depdiknas itu tidak memiliki petunjuk yang jelas bagaimana pelaksanaannya. Hal ini diungkap ketua Komisi C Ir. Junaedy Rahim, setelah melakukan kunjungan kerja ke Dinas P dan P Kota Jayapura. Junaedy mengatakan bahwa dalam hal ini pihaknya tidak menyalahkan Dinas P dan P Kota melainkan Depdiknas sebab instruksi dari pusat

tersebut telah menyalahi Keppres No.61 Tahun 2004. Selain itu dua proyek lainnya yakni proyek pembangunan Kantor DPRD Kota yang menelan dana sekitar Rp 24 miliar dan gedung Serbaguna sebesar Rp 18 miliar, rincian anggarannya dinilai tidak jelas. Hal ini terungkap saat pertemuan DPRD Kota Jayapura yang dipimpin, Ir. Junaedy Rahim beserta anggotanya Pdt. Charles Simaremare, Timbul Sidabutar, Rudolf Prawar dan A Jaenuri dengan Dinas PU Kota Jayapura.

8 April

Wakil Ketua Tim Pansus *Illegal logging* DPRP Ir. Weynand Watori, Tim Pansus DPRP akan bertolak ke Jakarta guna menemui Menhut untuk membicarakan tiga hal yakni, meminta agar kebijakan *stock opname* terhadap peredaran kayu lokal ditarik kembali. Kemudian menyangkut pelelangan kayu sitaan, akan diusulkan kepada Menhut agar hasilnya dikembalikan ke Papua, selain itu akan disampaikan juga rencana pembentukan tim penyusunan Perda dan Perdasi tentang pengelolaan hasil hutan di Papua.

Menurut Anggota DPRD Kota Jayapura Achmad Jaenuri total anggaran yang digunakan pembangunan lapangan tenis Kantor Walikota itu masih kurang jelas sebab berdasarkan laporan, anggarannya berkisar Rp 4,5 miliar, yang bersumber dari APBD Kota melalui Dinas PU, bantuan KONI Provinsi Papua dan bahkan sisa biayanya dibebankan ke Dinas Pemuda dan Olahraga. Akan tetapi, menurut kepala Dinas PU Kota Jayapura Ir. R Indratno, M. Eng, Dinas PU sebagai pihak pelaksana hanya mengelola dana sebesar Rp 1 miliar yang bersumber dari APBD Kota Jayapura.

Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Eddy Sôetiyono, SH, mengatakan bahwa tiga mantan anggota DPRD Merauke yang diduga terkait dengan penyalahgunaan uang negara Rp 4,9 miliar lebih telah dipanggil oleh pihak Kejaksaan Negeri Merauke namun hingga saat ini mereka belum memenuhi panggilan tersebut. Tiga orang tersebut yakni Asaria wanggai, Agusta K. Songmen dan Pieter Radjawane, SH (mantan Ketua I DPRD Merauke).

9 April

Menyangkut 4 Perwira Menengah (Pamen) Polda Papua yang diduga terlibat *illegal logging*, Kapolda Papua Irjen. Pol. Drs. D. Sumantyan HS mengatakan bahwa kasus ini masih diselidiki oleh Tim OHL dari Mabes. Menurut Kasatgas Humas OHL Kombes. Pol. Drs. S. Usman Nasution, SH, MH,MM bahwa surat panggilan ke Polda Papua bagi salah satu dari 4 Pamen tersebut (Kopol MR) dengan status sebagai tersangka sudah dilayangkan dan pemeriksaan akan diadakan pada Selasa (12/4). Selain itu, pihaknya menjelaskan bahwa tersangka Kolonel. Inf. Richard Ginting sudah ditahan secara resmi Jumat (8/4) malam saat pemeriksaan yang bersangkutan. Nasution menjelaskan bahwa, Ginting yang ditahan bersama Kaspar di Markas Den. Pom Sorong itu, dijadikan tersangka sehubungan dengan pemalsuan L/C dalam kasus pengiriman kayu ke luar negeri tahun 2001, yang melibatkan Hans Chandra (buron) dan mantan Kacab BNI Sorong Dharmawan. Karena pemalsuan L/C itu, Hans Chandra tidak membayar DR (Dana Reboisasi) dan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) meski dana sudah dicairkan. Karena itu, kasus ini juga mengarah ke tindak pidana korupsi. Selanjutnya Nasution mengatakan bahwa sampai hari Jumat (8/4), jumlah barang bukti yang disita terdiri dari 69.885 batang kayu atau 370.244 M3 kayu bulat, 19.728 kayu olahan, 794 unit alat berat, 5 buah kapal, 43 unit mobil, 11 tongkang, 12 tug boat, 46 unit chainsaw serta 298 unit alat lain.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor Nehemia wospakrik, SE, B.Sc, pihaknya mendukung penuh keinginan Tim Pansus *Illegal logging* DPRD untuk mencabut kebijakan *stok opname* karena ribuan karyawan pada perusahaan-perusahaan kayu terancam PHK. Misalnya, Kasus PT. Wapoga Mutiara Industries di Biak yang sementara ini tidak beroperasi.

Kepala Kejari (Kejaksaan Negeri) Merauke Eddy Soetiyono, SH, menyatakan bahwa Kejari akan memanggil untuk memeriksa para mantan anggota DPRD Merauke periode 1999-2004 yang pada periode ini terpilih menjadi anggota DPRD, baik di Kabupaten Merauke (induk) maupun kabupaten pemekaran yakni Mappi, Asmat dan Boven Digoel, terkait dengan dugaan penyalahgunaan uang negara tahun anggaran 2002 sebesar RP 4,9 miliar lebih. Hal ini dilakukan karena surat persetujuan tertanggal 30 Maret 2005 dengan nomor 180/629/SET tentang persetujuan pemanggilan dan pemeriksaan para anggota dewan tersebut, sudah ditandatangani Gubernur dan kini sudah dipegang oleh Kejari Merauke. Surat itu ditembuskan ke Jaksa Agung RI, Kapolda Papua, Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digoel. Menurut Kajari Soetiyono, surat persetujuan itu turun terkait dengan surat dari Kejaksaan Tinggi Papua No. B. 194/T.1/Fd/02/2005 tanggal 25 Februari 2005 perihal permohonan ijin/persetujuan tertulis untuk memanggil dan memeriksa para anggota DPRD tersebut.

Masyarakat mempertanyakan tentang kapan proyek pengadaan air bersih yang dilaksanakan PDAM Manokwari sejak tahun 1997 dan menghabiskan dana miliaran rupiah itu rampung dan hasilnya bisa dirasakan.

11 April

Puluhan tenaga perawat Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Abe, melakukan demo ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Kotaraja, karena dugaan kasus pemalsuan tandatangan dr Edison M.L Goal oleh Kepala Seksi Keperawatan RSJ Abe, Daniel Simonapendi AMKY yang tengah diproses penyidik di Polsekta Abepura. Koordinator demonstran, Gerson AMK mengatakan bahwa mereka menuntut agar masalah ini di cabut dari kepolisian karena merupakan masalah internal dan menuntut agar Dinas Kesehatan segera menangani kasus ini dan tidak membiarkan masalah ini diproses di polisi. Mereka mengancam akan mogok kerja kalau tidak ada tindakan dari Dinas Kesehatan sebagai institusi di atas RSJ Abe.

Pengadilan Negeri Jakarta mengabulkan gugatan Bupati Nabire AP Youw dalam sidang perkara pencemaran nama baik yang bersangkutan, dengan nomor registrasi no.248/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst. seperti dikatakan oleh AP Youw ketika memberikan keterangan kepada pers di Mandala Cafeteria bahwa, dalam amar putusan yang dibacakan Majelis Hakim pada 5 April 2005 lalu, menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum. para tergugat tersebut yakni Ir Helly Weror (tergugat I), Ir Ruben (tergugat II), Ir Merthen Wanma, M.Si (tergugat III), Hartomo (tergugat IV) dan DR. Andi Hamzah (tergugat V).

19 April

Dalam menangani kasus korupsi Rp. 4,9 milyar oleh sejumlah mantan anggota DPRD Merauke, Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, Eddy Soetiyono SH, mengatakan kepada pers bahwa pihaknya tidak mematok target waktu. Proses pemeriksaan memasuki tingkat penyidikan dan baru memeriksa 6 dari 33 orang yang akan diperiksa.

Salah satu pengusaha kayu lokal di Papua, Daniel Gerden, mengharapkan agar surat larangan pergerakan kayu (stok opname) oleh pihak kepolisian dicabut. "Jumlah kerugian para pengusaha akibat *illegal logging* tidak sedikit. Barang-barang yang disita kurang lebih sekian ratus unit, sekian ratus ribu meter kubik kayu. Setelah dihitung kerugiannya kurang lebih 1,3 triliun".

20 April

Kepala Pemerintahan Adat Papua, Sefnat Ohee, menanggapi rencana Menhut MS Kaba'an mengenai izin pengganti HPH dengan menyatakan bahwa format izin tersebut hendaknya melibatkan pemerintahan Adat Papua dan hasil pengelolaannya dikembalikan kepada masyarakat adat.

Sekda Kota Jayapura, Th. Pasaribu, menyatakan keprihatinannya mengenai kesemrawutan pengelolaan Pasar Youtefa di Kotaraja dan menegaskan bahwa Kepala Dinas Pasar harus bertanggung jawab.

Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura, Gerson Sony Awi, mempertanyakan sejauh mana penanganan kasus korupsi di Dinas Kesehatan Kota Jayapura dengan tersangka Drs. Ferry Taberima M.Kes. Menanggapi hal ini Sekda Kota Jayapura, Pasaribu, menyatakan bahwa Pemkot sedang mencari Pelaksana Tugas Kadinkes.

Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor, Djoko Indra Setyawan, menyatakan bahwa Tim Penyidik Kejaksaan akan memanggil tiga pejabat Pemkab Biak untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan Penyimpangan Dana Bencana Alam di Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor. Ketiga pejabat tersebut adalah Wakil Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bagian Keuangan Sekda Biak Numfor dan Panitia Tender.

153 orang karyawan PT BASS Cabang Merauke (sebuah perusahaan di bidang perikanan laut) yang di-PHK mendatangi Dinas Tenaga Kerja Merauke guna menuntut pembayaran gaji mereka selama tiga bulan yang belum dipenuhi. Karyawan yang dipimpin oleh Muhammad Safei ditemui Kadisnaker, Drs. Jamaluddin.

Kompol Martin Reno yang dinyatakan sebagai tersangka diterbangkan ke Jakarta untuk diperiksa oleh Tim Penyidik Mabes Polri dalam kaitan dengan pembalakan kayu liar, demikian pernyataan Kapolri Jend. Pol. Da'i Bachtiar.

22 April

Kepala Dinas Pendidikan Menengah Merauke, Drs. Yoseph YM Mahuze menjelaskan kepada pers bahwa Dikmen Merauke mengalokasikan dana sebesar Rp. 1,571 milyar untuk membebaskan ujian nasional dan ujian sekolah. Dana tersebut terbagi menjadi Rp. 526.672 untuk ujian nasional dan Rp. 530.470 untuk ujian praktik masing-masing siswa SMP, SMA dan SMK.

Masyarakat Siriwo di Nabire menuntut pembayaran ganti rugi daerah penambangan emas di wilayah tersebut sebesar Rp. 15 juta setiap perusahaan terhitung sejak November 2004 bagi 14 perusahaan yang berada di wilayah tersebut.

Pangdam XVII/ Trikora, Nurdin Zainal, menjelaskan kepada pers status tiga perwira TNI AD yang terlibat dalam kasus *illegal logging*, yakni Kolonel Richard Ginting (Kepala Puskopad), Letkol Sianturi (Mantan Dandim Manokwari) dan Kapten Kaspar, "Mereka masih dalam proses penyidikan, sehingga sampai dengan sekarangpun saya masih

beranggapan belum ada keputusan yang bersifat tetap dan bersalah. Status mereka adalah tersangka menurut Wadanpuspom Brigjen TNI Hendarji". Kolonel Ginting belum akan diganti karena belum ada keputusan tetap.

Sekretaris Menkosospolkam, Laksdya Djoko Sumaryono, meninjau lokasi penampungan ratusan kayu gelondongan berdiameter 100 cm-140 cm milik PT Kamoro Mina Sejahtera (KMS) di Mimika yang telah disegel oleh Polres Mimika sebagai bagian dari Operasi Hutan Lestari II. PT KMS telah beroperasi dua tahun di wilayah tersebut dan belum membayar gaji 150 orang karyawannya.

24 April

Tim Gabungan Polda Kalbar dan Imigrasi Entikong menangkap Tie Sing Yew (51 tahun) yang merupakan salah satu aktor penting pembalakan hutan liar di Papua dari 34 orang yang termasuk dalam DPO Polda Papua. Menurut Direktur Serse dan Kriminal Kombes Pol. Heru Setiawan, tersangka merupakan direktur PT Makmur Abadi Trading yang memasok alat berat untuk menjarah hutan Papua.

28 April

Kapolri, Jend. Pol. Da'i Bachtiar, mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 157 orang pelaku pembalakan kayu liar termasuk orang Malaysia dan Korea Selatan. Pihaknya juga menyatakan bahwa lebih dari 340.000 m kubik kayu olahan dan 19.000 kubik kayu lapis olahan telah disita dalam OHL.

30 April

Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, Eddy Soetiyono SH, menyatakan bahwa tiga mantan anggota DPRD Merauke periode 1999-2004: Cililia Renyut, Syamsul Cohmar, dan Agusta T. Songmen, telah diperiksa pada tgl. 29 dan 30 April atas dugaan korupsi dana penunjang kegiatan Dewan sebesar Rp. 80 juta per anggota. Ketiganya mengaku tidak memiliki surat pertanggungjawaban tentang penggunaan dana. Mereka mengaku bahwa terdapat ketidakseimbangan antara dana penunjang bagi ketua dan wakil ketua, yakni masing-masing sebesar Rp. 600 juta dan Rp. 300 juta sementara bagi anggota hanya Rp. 80 juta.

1 Mei

Dua oknum perwira TNI-AL, Letkol Dinasworo Pandoe dan Letkol GN, ditetapkan sebagai tersangka kasus *illegal logging* karena menyimpan kayu ilegal sebanyak 4.800 m kubik jenis kayu merbau.

Kapolres Jayapura, AKBP Robert Djoenso, menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan perkara *illegal logging* sudah diserahkan ke kejaksaan dengan tersangka Mr. Cung beserta bukti 1.005 batang kayu dan 12 unit alat berat dari CV. Corina Jaya, Kenan Sipayung yang diduga menyalahgunakan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), AKP Sumadi dan Kopol Haryanto yang diduga terlibat melalui Puskopolda dan Basman Gultom yang diduga terlibat melalui PT Bama Pratama Adi Jaya yang dinilai ilegal dalam berusaha. Semuanya dijerat dengan UU 41/1999 tentang Kehutanan.

Ketua Tim Gerakan Penegak Reformasi Pembangunan (RAKFORBANG) Kabupaten Jayawijaya, Pene Ifi Kogoya dan sekertarisnya Naftali Mabel, dalam pernyataan persnya mengatakan pihaknya telah menemukan adanya dugaan penyimpangan dana Otonomi Khusus dan DAU. Dana Otsus Kabupaten Jayawijaya tahun 2003 Rp. 13.594.607.630

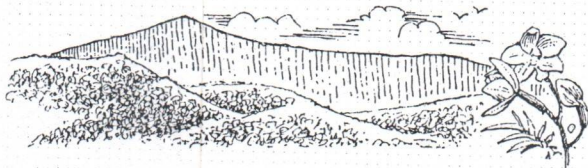
dan dana DAU sebesar Rp. 19.090.913.204 serta dana DAK DR sebesar Rp. 1.301.937.000. RAKFORBANG mendesak Reskrim Polda supaya segera mengumumkan siapa saja yang telah menjadi tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana APBD Kabupaten Jayawijaya.

2 Mei

Kapolda Papua, D. Sumantyan, memberikan penghargaan kepada tiga anggota Polsek Sarmi yang telah berhasil menangkap Kapal Asing MV Godri Dua yang memuat ribuan kubik kayu log yang diduga merupakan hasil pembalakan kayu liar. Ketiga anggota polsek tersebut adalah Wakapolsek Ipda Bernard T. Haley, Bripda Sergius Mudumi dan Bripda Musa A. Yakeding.

4 Mei

Puluhan warga Koya dan Muara Tami mendatangi kantor Walikota Jayapura guna menuntut Kadinkes Kota Jayapura, Ferry Taberima, turun dari jabatan karena dinilai mengkorupsi dana PKS BBM untuk keluarga miskin. Sekda Kota Jayapura, Th. Pasaribu, yang menerima massa mengakui kebenaran tuduhan tersebut seperti telah diberitahukan oleh Polresta Jayapura tetapi sekaligus mengajak pendemo mengikuti mekanisme yang ada.



Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jayapura, Yohanes Eluay menyatakan bahwa pihaknya sangat mendukung upaya Bupati Jayapura, Habel Suwae, untuk merehabilitasi kawasan cagar alam Cyclops.

6 Mei

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Manokwari, Drs. Stefanus Selang MM mengaku pusing dengan distribusi minyak tanah yang dikurangi 17 tangki per bulan oleh pemerintah pusat.

7 Mei

Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Merauke mengadakan aksi demo damai ke DPRD Merauke guna memprotes kelangkaan minyak tanah di Merauke selama beberapa minggu terakhir.

9 Mei

Majelis Hakim yang diketuai FX Soegiarto SH dan didampingi dua hakim anggota, Majedi Hendi Siswara SH dan Siswatmono Radianoro SH, menolak eksepsi tim kuasa hukum Ir. Marthen Kayoi MM, terdakwa kasus pembalakan kayu liar.

Kepala Puskesmas Hamadi, dr. AM, resmi menjadi tersangka dalam kasus penggelapan dana-dana operasional Puskesmas.

10 Mei

Sejumlah guru di Kabupaten Jayapura mempertanyakan masalah honor mereka yang telah 2-3 bulan tidak dibayar oleh pemerintah. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayapura, Drs. Theodorus Arim, membenarkan pengaduan tersebut dan menjelaskan bahwa pembayaran itu dilakukan beberapa bulan sekali karena penyaluran dana dari pusat mengalami keterlambatan.

Eks-karyawan PT Bass Cabang Merauke akhirnya menyepakati pembayaran pesangon PHK sebesar 170% dari gaji mereka setelah sebelumnya menuntut 200%.

Tim Operasi dari tiga kesatuan Polres Merauke menemukan timbunan minyak tanah sebanyak 4,6 ton di Jl. Prajurit I Gang I, Merauke, milik salah seorang warga masyarakat. Pelaku langsung ditangkap dan ditahan di Mapolres Merauke beserta barang buktinya.

11 Mei

Menanggapi isu dugaan korupsi Rp.100 milyar oleh Bupati Jayawijaya, David Hubi, Lakhar Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Drs. BPH Sitompul, menjelaskan bahwa pihak Polda masih menunggu izin dari Presiden sebelum dapat memeriksa yang bersangkutan.

Ketua DPRD Kabupaten Keerom, Konrad Gusbager, menjelaskan kepada media massa bahwa pendapatan asli daerah Keerom hanya sebesar 5% dari APBD Keerom 2005/2006 yang mencapai jumlah Rp. 136.757.344.396.

Sebagai bagian dari OHL II, Dinas Kehutanan Merauke tidak mengeluarkan izin SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) kecuali untuk kayu yang akan digunakan sendiri dengan besaran di bawah 5 meter kubik.

Kepala Dinas P dan P Nabire, Petrus Danomira, menyatakan bahwa Pemkab Nabire menyiapkan dana senilai Rp. 1,5 milyar untuk UNAS dan UAS di wilayah tersebut.

12 Mei

Ketua DPRD Keerom, Konrad Gusbager, mengkritik tindakan Pemerintah Kabupaten Keerom dalam pendirian menara telpon untuk PT. Indosat senilai Rp. 1,2 milyar dengan menggunakan Dana Otsus.

14 Mei

Kapolri Dai Bachtiar menyatakan bahwa Kopol Marthen Reno telah resmi dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pembalakan kayu liar dan tengah menjalani pemeriksaan oleh Mabes Polri di Jakarta.

15 Mei

Dalam pertemuan dengan Kepala Dinas P dan P, Dra. WW. Kambuaya, para siswa beserta orang tua SMA Korpri Jayapura mengangkat masalah pungutan Rp. 250.000 untuk UAN yang lebih besar daripada sekolah lain. Mengenai hal ini, Kepala Dinas hanya mengatakan akan menanganinya secara baik.

LSM Gerakan Pemuda Peduli Pembangunan Papua (GP-4) melakukan unjuk rasa ke kantor DPRD Sorong dipimpin oleh Direktornya, Agus Isir. Mereka menuntut DPRD agar segera mengambil langkah guna mengatasi kelangkaan minyak tanah di kota Sorong.

Forum Partisipasi Masyarakat Merauke untuk Pembangunan (Forpammer) mengancam akan menggugat RRI Merauke secara hukum karena membatalkan rencana dialog interaktif secara sepihak. Drs. Umar Solle, Kepala Cabang RRI Merauke, menjelaskan bahwa pembatalan tersebut dilakukan untuk menghindari konflik dalam masyarakat.

16 Mei

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, dr. Esterlina Ayomi, mengungkapkan bahwa penyakit yang dominan diderita masyarakat di Jayapura adalah malaria dan ISPA (infeksi saluran pernafasan) karena kondisi lingkungan, tenaga dan sarana kesehatan yang terbatas.

17 Mei

Dalam sidang kasus pembalakan kayu liar terdakwa ML. Rumadas, Kadishut IJB, Saksi dari Depdagri, Drs. Safrizal SH, memberikan keterangan bahwa IPKMA yang dikeluarkan oleh pejabat di Papua adalah ilegal sebelum dikeluarkannya Perdatus.

18 Mei

Kepala Seksi Jaksa Pidana Umum Kejari Manokwari, Nifianto SH, mengatakan kepada pers bahwa satu lagi BAP kasus pembalakan kayu liar telah dinyatakan lengkap (tahap P-21), yakni tersangka Tatag Widiatmoko, Ketua Kopermas Serba Guna beserta Dadi Narwawan dan Baren Ainusi (karyawannya).

20 Mei

Meski OHL di wilayah Papua telah berakhir, Lakhar Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Drs. BPH Sitompul, menyatakan bahwa pihak Polda telah membuka media centre OHL Matoa II 2005 dengan tujuan memberikan informasi mengenai hasil dan dampak OHL Matoa II tersebut.

22 Mei

Guru bantu di Manokwari mengeluh karena sudah 3 bulan tidak menerima gaji. Pihak sekolah biasanya mengemukakan alasan bahwa pembayaran gaji sedang diproses.

23 Mei

Permintaan DPRD Manokwari untuk menurunkan standar kelulusan siswa SD, SMP, SMU/ SMK ditolak dengan tegas oleh Kadis Dikmendbud, Drs. Nicodemus Baru MM, dalam dengar pendapat dengan DPRD Manokwari. DPRD meminta agar standar diturunkan guna mengurangi banyaknya siswa yang tidak lulus yang akan mempengaruhi pelaksanaan PILKADA.

24 Mei

Yonelius Karafir mewakili Komisi Gabungan di DPRD Kabupaten Jayapura menyatakan penolakan Komisi terhadap sebagian RAPBD 2005 yang diajukan Pemkab Jayapura. Pos-pos pengeluaran yang ditolak adalah rencana perluasan jalan raya dari gunung merah hingga Jl. Sosial; belanja bantuan dana pembangunan pemekaran Kabupaten Sarmi dan Keerom; pengadaan pakaian satgas Pemilu 2004; alat inventaris rumah tangga; sementara pengadaan komputer diminta dialihkan untuk pengadaan kendaraan bermotor roda 2 untuk petugas penyuluh pertanian.

25 Mei

Kepala Bidang P2M Dinas Kesehatan Nabire, Drs. Daniel, menjelaskan kepada pers bahwa di Nabire sudah ditemukan 163 kasus positif AIDS pada tahun 2005. Dari jumlah tersebut, banyak yang sudah meninggal dan sebagian sulit dideteksi.

26 Mei

Sengketa tanah antara Suku Ongge dengan PT Skyline Kurnia di Waena berakhir dengan penyerahan kembali 14 ha ke adat dengan perantaraan DPRD Kota Jayapura. 3,5 ha akan tetap digunakan sebagai lokasi perumahan Yabansai Grand.

Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Elieser Renmaur, menjelaskan kepada publik bahwa Pemkab mengalokasikan dana sebesar Rp. 7-8 miliar untuk program beasiswa dengan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh siswa yang berasal dari wilayah tersebut. Hal itu adalah bagian dari alokasi dana APBD sebesar 30% (Rp. 20-30 milyar) untuk sektor pendidikan.

27 Mei

Ratusan Warga BTN Cigombong melakukan unjuk rasa ke DPRD Kota Jayapura mendesak agar Pertamina dan agen minyak tanah menangani kelangkaan bahan bakar minyak tanah di wilayah tersebut.

Kepala Sekretariat KPA Kota Jayapura, Drs. Binton Nainggolan, menyatakan kepada pers bahwa penanggulangan HIV/AIDS di Kota Jayapura mengalami kesulitan karena belum adanya perda untuk itu. Hal ini menyebabkan KPA maupun aparat lain sulit melakukan penertiban di lapangan, seperti di bar dan panti pijat.

Pjs. Gubernur IJB, Abraham O Atururi menyerahkan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 367,75 milyar yang bersumber pada APBN kepada 11 instansi di provinsi tersebut.

30 Mei

Wakil Ketua Tim Pansus *Illegal logging* DPRP, Ir. Weynand Watori, mendesak Polda untuk segera mengumumkan hasil evaluasi OHL II yang telah dilakukan selama ini agar masyarakat mengetahui hasilnya. Pihaknya sekaligus juga menyatakan keberatan atas rencana Polda untuk melelang kayu sitaan sebelum ada koordinasi dengan pihak yang bertanggung jawab, termasuk DPRP.

Ketua Komisi D DPRD Kota Jayapura, Ichwanul Muslimin, mempertanyakan alokasi dana kesejahteraan guru sebesar Rp. 1 milyar dalam anggaran 2005 sementara laporan sejumlah guru menunjukkan bahwa mereka hanya menerima Rp. 5.000,- per bulan.

31 Mei

Dalam menanggapi desakan dari Tim Pansus *Illegal Logging* DPRP terhadap Polda Papua agar segera mengumumkan hasil Operasi Hutan Lestari (OHL) II, Pelaksana Tugas Harian (Lakhar) Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Drs. BPH Sitompul, menegaskan bahwa sebagai penyidik, Polda Papua tetap transparan dan tak pernah berniat untuk menutup diri soal hasil OHL II yang selama ini berlangsung. "koordinasi dengan pihak dewan juga sudah kita lakukan. Hal itu dibuktikan dengan kami memenuhi panggilan Tim Pansus DPRP terkait OHL II tersebut. Bahkan Kapolda Papua langsung yang datang," jelas Sitompul. Kemudian menyangkut rencana lelang kayu sitaan, Sitompul mengatakan, "Kami tetap mematuhi prosedur lelang. Makanya ada tim yang dibentuk. Tidak saja Polda Papua, tapi juga Kejaksaan, Kantor Lelang Negara (KPN), staf ahli dari Dinas Kehutanan serta instansi terkait. Saat ini baru mulai mendata, jadi belum ada yang dilelang". Dari 93 perkara yang dilaporkan, 173 orang resmi dinyatakan sebagai tersangka, dengan rincian 159 WNI, 13 WNA asal Malaysia, 1 WNA asal Korea. Bahkan 18 perkara, berkasnya telah dinyatakan P.21 oleh Kejaksaan, sedangkan selebihnya masi dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Sedangkan menyangkut barang bukti, "barang bukti kayu yang berhasil di sita dari OHL II terdiri dari

kayu bulat sebanyak 72.310 batang dan kayu olahan sebanyak 20.116 M3. Sedangkan lainnya berupa alat berat 850 unit, kapal 5 unit, Tongkang 13 unit, Tack Boat 14 unit, mobil 43 unit, Chainsaw 45 unit, alat-alat lainnya 298 unit, termasuk dokumen-dokumen sebanyak 361 unit," papar Sitompul.

Meski secara nasional pemerintah sudah mengumumkan pembebasan biaya ujian semester maupun ujian nasional, namun hal ini ternyata tidak berlaku di Wamena, seperti diakui Kepala Sekolah SMP YPPK Santo Thomas Wamena Dra Cesilia Kipimbop bahwa meskipun tidak tega, pihak sekolahnya terpaksa membebaskan biaya ujian kepada setiap siswa sebesar Rp 135.000 karena dana bantuan dari Pemkap melalui Dinas P dan P Kabupaten Jayawijaya, belum turun juga.

Bupati Jayapura Habel M Suwae S.Sos, MM mengadakan pertemuan dengan para Kepsek SD untuk memastikan informasi adanya puluhan guru SD se-Kabupaten Jayapura yang belum menerima gaji bulan Mei. Ternyata dari pertemuan itu terungkap bahwa memang benar ada puluhan guru yang belum menerima gaji untuk bulan Mei. Untuk itu bupati memerintahkan Kabag Hukum Nehemia Karma untuk melaporkan kasus ini ke Pores Jayapura karena kasus ini cukup berat dan secara intern akan diperiksa oleh Bawasda.

Dua orang yang terkait dengan dugaan penggelapan gaji guru SD se-Kabupaten Jayapura akhirnya dilaporkan ke polisi. Oknum yang dilaporkan yakni, FW alias Wc pegawai Pengawai Pengurus Wilayah (PSW) YPK Sentani yang merupakan pembuat daftar gaji (juru bayar) guru SD YPK Sentani, dilaporkan dengan dugaan penggelapan gaji guru YPK di Kabupaten Jayapura bulan Mei 2005. Seorang lagi yakni, LH, Bendahara Rutin Dinas P dan P Kabupaten Jayapura dilaporkan atas tuduhan penyalahgunaan dana subsidi bantuan penyelenggaraan pendidikan pada Dinas P dan P Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2005. Kabag Hukum Nehemia Karma, menjelaskan bahwa salah satu guru sudah bersedia menjadi saksi yakni Yoneke Danya guru SD YPK Tablanusu Distrik Depapre.

1 Juni

Perawat di RSUD Abepura, sejak Januari 2005 sampai saat ini belum menerima uang jasa medis serta uang jasa askes JPS. Karena itu, sejumlah perawat berdialog dengan Direktur RSUD Abepura dr AK Mallisa SpR. Menurut seorang peserta dialog, suster Fin, "Meski uang itu jumlah sedikit tapi sangat berarti bagi kehidupan kami sehari-hari." Selanjutnya, kata suster Fin, "Kalau pemerintah menginginkan perawat memberikan pelayanan yang terbaik maka kesejahteraannya juga harus diperhatikan." Sedangkan menurut temannya, suster Leni, "Kami tidak main-main karena kalau jasa medis belum dibayar maka kami akan mogok kerja dan pelayanan ditutup," ancamnya. Sementara, se usai pertemuan tersebut, dr AK Mallisa SpR mengatakan bahwa sebenarnya uang jasa medis ini telah lama diajukan ke Biro Keuangan Provinsi Papua namun tidak ada jawaban. " Saya akui bahwa para perawat di rumah sakit ini belum menerima uang jasa medisnya," kata Mallisa.

Berkas kasus ilegal logging yang melibatkan tersangka General Manager PT. Wapoga Mutiara Industries Mr. Tang Tung Kwong alis Freddy Tan dilimpahkan pihak Kejaksaan Negeri Biak Numfor ke Pengadilan Negeri Biak Numfor.

Akibat belum adanya kejelasan tentang nasibnya, puluhan pegawai negeri sipil (PNS) eks Dinas Perkebunan Kabupaten Manokwari, menggelar aksi demo damai. Aksi yang

berlangsung sekitar pukul 08.30 WIT dan diikuti oleh seluruh staf PNS di lingkungan eks Disbun ini dengan memasang beberapa pamflet di dinding dan kaca-kaca jendela kantor eks Disbun tersebut. Pamflet-pamflet tersebut diantaranya bertuliskan, "Gedung Kantor eks Disbun bukan untuk dikontrakkan," pegawai eks disbun jangan dijadikan pengangguran terselubung." Selain kedua pamflet itu, ada salah satu pamflet yang ukurannya lebih besar dari pamflet lain dan bertuliskan, "Mau dikemanakan nasib ribuan petani perkebunan dan pegawai eks perkebunan."

Setelah tertangkap aparat kepolisian di Entikong, perbatasan RI-Malaysia, Tie Sing Yew alis Mr Tie (54 tahun) warga negara Malaysia kelahiran Serawak, Direktur PT Makmur Abadi, tersangka ilegal logging yang beroperasi di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama ini siap diseret ke meja hijau setelah Polres Manokwari melalui penyidikanya, Brigadir Abdul Muchlis Tanaiyo, hari ini (1/6) pukul 11.45 WIT menyerahkan berita acara pemeriksaan tahap II kepada Kejaksaan Negeri yang diterima Kasi Pidana Umum (Kasi Pidum) R Nofianto SH. Tersangka dititipkan di Lapas setelah diperiksa oleh Kasi Pidum dan sekaligus disertai pelimpahan barang bukti (BB) berupa : 32 unit alat berat, 612 batang kayu merbau dan 24 kayu mix.

2 Juni

Tim Pansus Ilegal Logging DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) menemukan sejumlah penyimpangan pada Operasi Hutan Lestari (OHL) II di Papua. Penemuan penyimpangan tersebut berdasarkan hasil peninjauan langsung mereka ke sejumlah daerah di Papua. Salah satunya adalah di Desa Iwon, Distrik Kemtuk Gresi daerah Taja Dua, Kabupaten Jayapura. Penyimpangan tersebut mencakup bukti hasil sitaan kayu yang diperoleh dari OHL II.

Ratusan pengusaha dari berbagai organisasi pengusaha di Manokwari, antara lain ARDIN, Gapensi, Aspap, Kadin dan organisasi pengusaha lainnya melakukan demo. Mereka mendatangi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Dinas PU dan Perhubungan soal pelelangan proyek-proyek di Provinsi IJB yang tidak terbuka. Terkesan proyek tersebut sudah dibagi dan diplot-plotkan masing-masing pengusaha yang berasal dari luar Papua dan memiliki uang.

Terkait dengan rencana kenaikan tarif air oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jayapura terhitung mulai Juli 2005, Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Ir Tunggal TH Simbolon, menegaskan agar rencana kenaikan ini perlu disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa kenaikan hanya diberlakukan pada pelanggan instansi, industri atau perumahan mewah, sementara rumah tangga tidak mengalami kenaikan karena disubsidi silang oleh pelanggan lain. Tujuan kenaikan ini adalah agar pelayanan PDAM lebih baik dan juga diharapkan mengurangi ketergantungan alokasi dana dari pemerintah Kabupaten Jayapura, dimanah sebagai BUMD diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Namun hingga saat ini pemerintah masih memberikan dana operasional bagi PDAM, tahun 2004 sebesar Rp 270 juta dan tahun ini masih mendapatkan juga yang besarnya tidak jauh dari tahun 2004.

3 Juni

Ancaman para perawat RSUD Abe untuk mogok kerja jika uang jasa medis mereka selama 6 bulan tidak dibayarkan benar-benar terwujud. Puluhan perawat di rumah sakit menggelar aksi mogok kerja. Sejumlah bagian seperti polik, ruang perawatan, ruang

operasi, laboratorium, ruang radiologi, dan UGD sebagai salah satu pintu pelayanan rumah sakit lumpuh total. Para dokter pun tidak bisa berbuat banyak tanpa perawat, seperti di UGD, polik dan ruang operasi. Para pengunjung yang membutuhkan pelayanan rumah sakit tersebut, terpaksa pulang dengan kecewa.

Tema sentral peringatan hari lingkungan hidup kali ini adalah 'Jadikan bumi bersih dan hijau,' namun fakta di Kota Jayapura menunjukkan kecenderungan yang bertolak belakang dengan tema tersebut. Menurut penuturan Kepala Bapedalda Kota Jayapura Drs. K. Watori, M.Si, masyarakat kota masih banyak yang membuang sampah sembarangan, entah itu di lingkungan tempat tinggalnya atau bahkan di pinggir atau batang sungai, sehingga tiga sungai yang mengalir di kota ini tak satupun yang bening tapi penuh dengan tumpukan sampah padat yang tidak terurai, sebut saja Sungai Anafri dan Acai. Hal ini akan berdampak pada masalah serius bagi kelangsungan hidup biota laut di Teluk Youtefa. Dari 150.000 kubik sampah yang dihasilkan tiap hari, hanya 1/3 sampai setengahnya yang bisa diangkut Dinas Kebersihan karena terbatasnya fasilitas. Masalah lain yang tidak kalah serius adalah menipisnya cadangan air dan banjir yang sering terjadi di Entrop dan Waena, akibat gundulnya hutan di Cycloop yang sebenarnya berfungsi sebagai kawasan tangkap air.

10 Juni

At least 33 children under the age of five in Indonesia's Papua province have been officially diagnosed with the Human Immune-deficiency Virus (HIV), the Jakarta Post quoted a government health official as saying on Friday. Chairman of the provincial health office of Papua, Tigor Silaban, revealed that the 33 infected children, from a number of regencies including the provincial capital of Jayapura, were believed to have acquired the virus from their infected mothers.

13 Juni

Gubernur Papua, JP Solossa menyatakan bahwa saham tersebut seharusnya pertamanya ditawarkan kepada Pemda, "Pemda Papua lebih berhak atas tawaran 9.36 persen saham PT Freeport Indonesia di PT Indocopper Investama daripada PT Aneka Tambang Tbk (Antam)."

C. HAK-HAK PEREMPUAN

4 April

Ketua Pokja Harian KPAD Provinsi Papua Agus Fausi SE, MM mengatakan bahwa sesuai data yang dihimpun KPAD Provinsi Papua per 31 Maret 2005 terdapat 1874 kasus, sedangkan data 31 Desember 2004 yakni 1749 kasus. Artinya dalam jangka tiga bulan saja naik sebanyak 125 kasus. Dan dari 1874 kasus ini, 1101 positif HIV, 743 positif AIDS sedangkan 244 diantaranya telah meninggal dunia. Dari jumlah kasus yang dilaporkan ini, Kabupaten Merauke paling tinggi yakni mencapai 700 kasus, disusul Kabupaten Mimika 592 kasus, Kota Jayapura 171 kasus, Kabupaten Sorong 131 kasus, dan Kabupaten Nabire 84 kasus sementara kabupaten lainnya masih di bawah angka-angka tersebut. "Angka kasus HIV/AIDS cukup tinggi dan kondisinya cukup memprihatinkan namun masyarakat menganggapnya hal yang biasa. Kalau hal ini dianggap sebagai hal yang biasa saja maka kedepan kasus HIV/AIDS ini kasusnya akan berlipat ganda jumlahnya dari yang sekarang," ujarnya.

5 April

Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat (YPKM) Papua memberikan pelatihan kepada kader pelayanan kesehatan untuk memahami persoalan kesehatan reproduksi,

peningkatan gizi keluarga dan HIV/AIDS yang diikuti oleh 20 orang mama-mama yang tinggal di pedesaan. Menurut Koordinator Panitia Penyelenggara dari YPKM Joice, meski sudah ditangani pihak pemerintah maupun swasta, namun kasus kematian ibu dan anak masih menjadi masalah besar di Papua selain itu ditambah lagi dengan penyebaran HIV/AIDS yang masih terus terjadi, yang disebabkan karena faktor kesehatan reproduksi. Oleh karena itu menurut Joice, mama-mama di kampung perlu dilibatkan dalam upaya penanggulangan ini. Sementara menurut Manager Program YPKM Drs. TG Butar Butar M.Kes sudah dua tahun ini YPKM memberikan perhatian khusus pada program kesehatan ibu dan anak serta penanggulangan HIV/AIDS yang dilaksanakan di 13 daerah pelayanan, yang terdiri dari 4 daerah di Kabupaten Jayapura dan 9 daerah di pinggiran Kota Jayapura.

8 April

Tingginya kasus HIV/AIDS di Papua membuat KPAD mengambil langkah untuk membuka VCT (voluntary counselling and testing) bagi masyarakat di daerah ini, diresmikan pada bulan Agustus 2004. Sejak berfungsinya VCT Juni 2004 hingga Maret 2005, klien yang memeriksakan dirinya sudah 350 orang yang umumnya dari kalangan menengah ke bawah.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Dr. Esterlina Ayomi, Mkes membenarkan adanya penambahan satu orang lagi pengidap HIV/AIDS di wilayah Kabupaten Jayapura berdasarkan hasil test VCT, yakni seorang ibu rumah tangga dari Distrik Kemtuk Gresi Sehingga untuk Jayapura (meliputi Kabupaten Sarmi dan Keerom) jumlahnya sebanyak 100 kasus/31 Maret 2005. Dari 100 kasus ini, sekitar 20-an terdapat di Keerom dan Sarmi.

9 April

Zr Sitti. S, AMP, staf di VCT (Voluntary Counselling and Testing) menuturkan bahwa sejak Juni 2004 hingga maret 2005, VCT telah menerima klien sebanyak 350 orang dan dari jumlah ini, sekitar 30% atau 73 orang diketahui terinfeksi virus mematikan itu. Dari jumlah itu, 61 orang diketahui positif HIV sedangkan 12 orang positif AIDS. Setiap bulannya, VCT menemukan 4 hingga 12 orang yang terinfeksi HIV/AIDS. "pernah dalam sebulan (September 2004) dari 42 orang yang datang periksakan darah, diketahui terdapat 12 orang yang positif HIV, " katanya miris.

11 April

Unicef perwakilan Papua menggelar pelatihan bidan koordinator puskesmas dan pengelola Program KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) Dinas Kesehatan kabupaten, yang berlangsung di Hotel Ratna selama lima hari. Kepala Perwakilan Unicef Papua Jolanda Dekker, MSc, MPH didampingi Ketua Program Kesehatan Dr Willy Kumurur mengatakan bahwa para peserta diambil masing-masing lima orang dari Kabupaten Binaan Unicef di Papua, yakni Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, Jayawijaya, Sorong dan Manokwari.

21 April

Theresia (39 tahun), ibu rumah tangga, mengalami tindak penganiayaan dari suaminya, TK, di Kompleks Victori Abe Pantai. Kasus ini ditangani oleh Polresta Jayapura yang langsung menangkap pelaku dan memprosesnya secara hukum karena ini merupakan tindakan yang kedua kalinya.

Dalam upacara hari Kartini di Jayapura, Sekda Pasaribu membacakan sambutan walikota Jayapura yang menyebutkan bahwa keberadaan perempuan di kota Jayapura perlu diperhitungkan, khususnya dalam PILKADA. Pihaknya merasa prihatin karena hingga kini tidak ada perempuan yang berani maju mencalonkan diri sebagai walikota.

22 April

Seorang perempuan 19 tahun mengalami tindak percobaan perkosaan oleh orang tak dikenal di Jl. Kodam Baru, Polimak, Distrik Jayapura Selatan. Kasus ini sedang diselidiki oleh Polresta Jayapura.

Seorang ibu guru (31 tahun) mengalami tindak penganiayaan oleh suaminya (39 tahun) sehingga melaporkannya ke Polsekta Abepura.

4 Mei

Di Jl. Tanjung Ria Dok IX Distrik Jayapura, seorang anak perempuan berumur 6 tahun diperkosa di samping rumahnya. Pelaku mengaku terpengaruh film porno yang ditontonnya.

9 Mei

Lina (19 tahun), seorang ibu rumah tangga, ditikam dengan pisau dapur di bagian paha kanannya oleh suaminya sendiri HM yang mabuk.

12 Mei

Lina Andriani (22 tahun) bersama empat temannya dari Surabaya mengadu ke Polsekta Abepura atas kasus pemaksaan bekerja sebagai pekerja seks. Pihaknya mengaku ditipu oleh orang yang menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Akan tetapi, karena korban tidak mengingat alamat dan identitas pelaku, polisi tidak berhasil menangkap pelaku.

16 Mei

Direktur PKBI Papua, Drs. John Rahail M.Kes, menjelaskan bahwa tingkat kerawanan penularan penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Tanjung Elmo, Sentani, cukup tinggi. Dilaporkan bahwa 99% penghuni baru membawa keluhan PMS dari tempat asalnya.

Tiga perempuan muda melaporkan diri ke Polsek Abepura karena dipaksa bekerja di Panti Pijat Waena. Polsek segera meminta keterangan pelaku yang membantah tuduhan itu sehingga akhirnya kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan memulangkan ketiga korban ke Surabaya.

18 Mei

Komisi Penanggulangan AIDS Kota Jayapura mengadakan lomba cerdas cermat HIV/AIDS di Aula Kantor Walikota Jayapura yang melibatkan pekerja bar, panti pijat dan tukang ojek.

Direktur YPKM, drs. Tahi Butar-Butar, mengatakan bahwa kasus HIV/AIDS di Papua makin memprihatinkan karena hingga 31 Maret 2005 terdapat 1874 kasus dengan Merauke sebagai wilayah yang paling banyak dengan 700 kasus, disusul Mimika dengan 592 kasus dan Jayapura dengan 171 kasus.

20 Mei

Wanita Keadilan DPD Partai Keadilan Sejahtera mengadakan pengobatan massal di APO Gudang Kelurahan Bhayangkara, Jayapura Utara.

29 Mei

Irmawati Lesi, Koordinator Pengobatan massal PKS, menyatakan bahwa penyakit Malaria merupakan penyakit dominan yang diderita warga di belakang pasar Hamadi, Jayapura.

31 Mei

Pusat Pembinaan Pengembangan Wanita (P3W) GKI di Tanah Papua mengadakan pelatihan tenaga relawan HIV/AIDS yang berlangsung di Aula P3W, Padang Bulan, diikuti oleh 20 orang peserta dari berbagai jemaat dan klasis, antara lain, Klasis Kemtuk Gresik, Klasis Yapen Timur, Klasis Baliem Yalimo, Jemaat Sion Padang Bulan, Jemaat Tobati dan Enggros, dan STT GKI IS Kijne. Dengan pemateri, dr Kambojdi selaku Konsultan Program United Evangelical Mission (UEM), pihak Global Fund Jayapura, Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat (YPKM) Papua, dan Monitoring Pendampingan Evaluasi (KKW). Menurut pimpinan P3W, Debora Busiara, SE, " dengan pengetahuan yang didapatkan dalam pelatihan relawan ini tentu diharapkan para anggota jemaat yang ikut dapat menyampaikan informasi secara tepat dan bertanggung jawab, serta mampu menciptakan program berdasarkan kebutuhan dan situasi jemaat."

Pemkab Biak Numfor bekerja sama dengan UNICEF memberikan pelatihan Peer Education untuk pecegahan HIV/AIDS khusus bagi generasi muda, bertempat di Hotel Irian yang diikuti kelompok pemuda gereja, remaja masjid dan kelompok kepemudaan lainnya. Dalam sambutan Bupati Biak Numfor yang dibacakan Asisten II Sekda Biak Numfor, bupati mengatakan, "Dengan adanya kegiatan seperti ini, pemahaman masyarakat terhadap HIV/AIDS semakin meningkat, sehingga tanggungjawab moral untuk memerangi penyebaran virus ini juga akan meningkat."

3 Juni

Seorang gadis (29) diperkosa di Taman Anggrek-Biak, Rabu (1/6), sekitar pukul 18.30 WIT. Ironisnya, korban (SW) yang saat itu meminta tolong kepada tersangka IR (25) agar mengantarkan SW untuk berobat ke kota, malah dipaksa melayani nafsu birahnya, walau korban sedang dalam keadaan sakit. Dalam melakukan aksinya, IR diduga dalam kondisi dipengaruhi minuman keras.

Bagian II

Apa yang sebenarnya terjadi di rumah kita, Papua?

Bulan April hingga Juni 2005 seluruh sudut negeri Indonesia dipenuhi dengan hiruk pikuk Pilkada (pemilihan kepala daerah), tak terkecuali Provinsi Papua dan Provinsi baru di Tanah Papua, yakni Irian Jaya Barat (IJB). Dinamika politik ini amat menyerap perhatian, tenaga, emosi dan kiranya berdampak serius bagi perkembangan demokrasi Papua di masa mendatang. Pernyataan politisi yang setiap hari dikutip media massa, pembicaraan orang di tempat kerja, kasak-kusuk di para-para, omongan orang di kampung-kampung, diskusi mahasiswa di kampus-kampus dan unjuk rasa di sejumlah kantor KPUD menjadi barometer betapa PILKADA adalah barang serius.

Meski unsur PILKADA menguasai hiruk-pikuk politik di seluruh Papua, unsur-unsur lain yang tercakup dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tetap menarik perhatian cukup besar sehingga bagian itu juga mendapat porsi sewajarnya dalam analisis ini agar potret keadaan rumah kita lebih nyata dan juga lebih lengkap. Lanjutan kasus pengadilan pembalakan kayu liar tetap menjadi perhatian dari banyak kalangan, terungkapnya kelumpuhan birokrasi pemerintah di Kabupaten Jayawijaya, pemogokan perawat di rumah sakit, pemogokan guru, problem kabupaten pemekaran—semuanya merupakan bagian dari wajah rumah kita.

A. HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

1. Hak berpartisipasi dalam pemerintahan

Dibandingkan dengan keadaan di berbagai kabupaten dan kota di bagian Indonesia lainnya yang diwarnai tindak kekerasan yang bersifat anarkis, derap kampanye PILKADA di Papua umumnya berjalan tanpa kekerasan. PILKADA terjadi di 13 kabupaten dan 1 kota berjalan lancar pada tgl. 28 Juni 2005 meski terjadi sejumlah unjuk rasa di Supiori, Merauke dan Kota Jayapura.

Terbalik dengan wilayah lain di Indonesia dimana isu 'putera daerah' kurang mendapat tempat, isu ini menjadi kriteria utama di 14 wilayah pemilihan dan tidak jarang bersifat emosional dan dieksploitasi oleh para politisi untuk mesiu kampanye. Salah satu contoh tekanan massa adalah rangkaian unjuk rasa di KPU Kota Jayapura saat pasangan calon Hendrik Hamadi dan Bangun Manurung tidak lolos dari seleksi administrasi. Massa dengan keras berargumen bahwa "orang Numbay¹ harus lolos" dan ketegasan sikap ini diwujudkan dengan blokade jalan Sentani-Jayapura yang menjadi urat nadi ekonomi dan perhubungan kedua titik tersebut. Akibatnya adalah wilayah publik menjadi korban dari amuk massa ini dan seakan-akan hal ini harus diterima oleh seluruh masyarakat.

Sisi lain dari dampak eksploitasi isu "putera daerah" dan sentimen suku di kalangan masyarakat Papua berdampak pada makin terpecah belahnya masyarakat hingga di tingkat kampung dan marga. Keterpecahan ini terjadi karena masyarakat terkotak-kotak sebagai pendukung pasangan bupati yang berbuntut pada permusuhan antar kampung

¹ Numbay adalah sebutan Kota Jayapura menurut suku asli yang menjadi pemilik hak ulayat Kota Jayapura.

dan marga yang dilaporkan terjadi di sejumlah kabupaten pemekaran seperti Mappi, Pegunungan Bintang dan Keerom.

Jika dicermati dari segi parpol yang bermain, Papua ternyata menjadi ladang kemenangan Partai Golkar. Terdapat 14 pasangan dari partai warisan Orde Baru tersebut dan dukungan dari pucuk pimpinan Golkar amat jelas dengan kedatangan Yusuf Kalla ke Manokwari dan Jayapura dengan pengawalan yang maha ketat menjelang hari PILKADA.

Pengawasan pemilu adalah unsur yang lain yang patut dicermati. Saat terjadi pemilu. Presiden dan Wapres, berbagai lembaga pengamat dalam dan luar negeri sibuk melakukan pemantauan secara cermat di berbagai kota di Papua. Hal ini tidak terjadi saat PILKADA berlangsung. Boleh jadi hal ini dianggap tidak sentral bagi perubahan demokrasi di Indonesia karena pemilu yang terjadi bukan berkaitan dengan pucuk pimpinan negara ini. Boleh jadi juga hasil PILKADA di Papua telah diramalkan sebelumnya oleh para pengamat sehingga tidak lagi menjadi pokok yang terlalu menarik minat para pengamat luar. Akan tetapi, dari segi proses pengakaran demokrasi di tingkat akar rumput, PILKADA ini menjadi salah satu tolok ukur kunci maju mundurnya demokrasi di Papua ini. Pengawasan pemilu seperti diatur dalam UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah mengharuskan bahwa Panitia Pengawas terdiri dari jaksa, polisi, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, dsb. Hal ini relatif dapat dipenuhi di daerah perkotaan di Papua tetapi di daerah pedalaman yang merupakan kabupaten pemekaran, apa yang dapat diharapkan? Lembaga-lembaga yang disebut belum seluruhnya ada seperti kejaksan apalagi akademisi. Tak heran jika pelaksanaan pemilu terkesan tidak banyak pelanggaran yang dilaporkan ke media massa mengingat Kabupaten-kabupaten pemekaran berada jauh dari pemantauan publik, seperti Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Keerom, Sarmi, Asmat, Mappi dan Boven Digul (www.hampapua.org/skp/hukum.html).

Karena ketiadaan instansi kritis yang mengawasi PILKADA, masyarakat tidak memiliki alat bantu untuk mengukur mutu kampanye satu pasangan. Informasi mengenai kinerja pasangan-pasangan bupati/ walikota kurang tersedia maksimal sehingga masyarakat tidak memiliki bahan pembandingan satu sama lain; bahkan informasi mengenai hal-hal dasar seperti tata cara pemilihan dan hak dan kewajiban pemilih kurang diketahui oleh masyarakat. Sejarah terulang. Politik massa mengambang kembali dihidupkan dan dieksploitasi dengan adanya pengerahan massa yang larut dalam hiruk pikuk kampanye sebagai tempat "penyaluran emosi rakyat" tanpa kesadaran akan pilihan politik dan konsekuensinya.

Fakta ini terjadi karena tiadanya upaya serius untuk sosialisasi UU 32/2004 dan PP No. 6/2005 seperti dilaporkan oleh jaringan SKP se-Papua. Di wilayah Kepala Burung, sosialisasi dilaporkan terjadi hanya di antara pegawai negeri dan birokrat sehingga rakyat yang menjadi pemilih terbesar justru diabaikan haknya untuk berpartisipasi dalam politik². Hal lebih parah terjadi di kabupaten Mimika dimana hingga hari ini DPRD Mimika belum juga disahkan akibat intervensi Bupati Mimika. KPUD Mimika yang telah dirombak karena Ketua KPUD lama terbukti melanggar hukum mengalami ancaman fisik dan mental oleh kelompok pendukung kepentingan penguasa sehingga tidak mampu

² Hasil pemantauan SKP Keuskupan Manokwari-Sorong (tidak diterbitkan), April 2005

menangani problem yang terus terbengkalai. Di Selatan Papua (Merauke, Mappi, Boven Digul, Asmat), suasana kebingungan masyarakat diperparah dengan upaya tim sukses pasangan-pasangan calon untuk mengklaim setiap kampung sebagai wilayah pasangan tertentu dan tim sukses lain dilarang masuk³.

Unsur lain yang tak kalah penting adalah pendanaan yang dibebankan kepada APBD. Terbatasnya anggaran merupakan keluhan yang dilaporkan oleh media massa tidak hanya di Papua tetapi di berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia⁴. Keterbatasan anggaran kiranya berkaitan dengan sistem pengawasan PILKADA yang lemah selain ketiadaan tenaga dan instansi pengawas yang memadai. Untuk Papua, KPU Provinsi Papua yang mengajukan anggaran kepada Pemprov Papua berkali-kali mengeluh bahwa RAB sebesar Rp. 170 Milyar dipotong menjadi Rp. 90 Milyar oleh Pemprov. Hal tersebut barulah biaya penyelenggaraan dari pihak pemerintah. Mari kita hitung berapa biaya yang dikeluarkan oleh calon-calon untuk mendapatkan dukungan dari parpol yang berhak mencalonkan dan untuk menjaring suara pemilih di 14 wilayah pemilihan. Bukan rahasia lagi bahwa politik uang memainkan peran besar dalam kemenangan pemilu meski hal ini begitu sulit dibuktikan karena sedikitnya pihak yang mengadu dan juga lemahnya Panitia Pengawas di tingkat kabupaten pemekaran.

Segi penting yang khas di pentas politik Papua adalah keterkaitan PILKADA dengan masalah 'abadi' IJB. Dua hal utama yang diperdebatkan adalah segi keabsahan pilkada dan konsekuensinya pada pendanaan PILKADA. Provinsi Papua berketetapan bahwa PILKADA IJB baru bisa dilaksanakan jika sudah terbentuk MRP dan kemudian dasar hukum yang mengatur keberadaan IJB sedangkan Pjs. Gubernur IJB dan Ketua KPUD IJB berkeras bahwa UU 32/2004 dan PP No. 6/2005 merupakan dasar sah dan mencukupi bagi pelaksanaan PILKADA. Karena tidak ada kesepakatan dan tidak ada upaya mempertemukan kedua pihak yang berseteru, segi pendanaan tidak bisa dibebankan pada dana Otsus menurut Gubernur dan DPR Papua.

Selain dua problem mendasar tersebut, hendaknya kita tidak lupa bahwa keberadaan KPU IJB yang bermasalah sejak awal pembentukannya pada 15 Desember 2003⁵ terus menerus melahirkan masalah demi masalah sejak pemilu legislatif, Pilpres, dan sekarang PILKADA.

Di tengah hiruk pikuk, mobilisasi massa, gerakan parpol-parpol peserta pemilu, kita dapat bertanya sebenarnya dimana posisi rakyat? Seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam PILKADA ini? Apakah hak berpartisipasi dalam pemerintahan benar-benar tersalurkan dengan pemilu langsung bupati/ walikota yang pertama kali terjadi dalam sejarah Indonesia? Penelitian DEMOS⁶ menyimpulkan bahwa upaya membangun demokrasi di Indonesia dengan PILKADA justru membuahkan keterpurukan demokrasi, pertanggungjawaban pemerintah yang makin lemah, dominasi pemerintah dan parpol terhadap rakyat makin besar.

2. Kebebasan berpendapat: aspirasi "M"

³ Hasil pemantauan SKP Keuskupan Agung Merauke (tidak diterbitkan), April 2005.

⁴ Lihat Liputan Khusus PILKADA 2005 dalam *TEMPO*, 12 Juni 2005, hlm. 26-57.

⁵ Korain, F, 2004, *Papua Aktual April-Juni 2004*, Jayapura: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura, hlm. 24. (www.hampapua.org/skp/indexb.html).

⁶ "Pilkada: Kegagalan 'Crafting Democracy', dalam: *TEMPO*, 24 Juli 2005, hlm. 92-94.

Meski tidak segencar di masa-masa lalu, gerakan perjuangan aspirasi M tetap membara di berbagai kelompok diskusi mahasiswa Papua dan gerakan politik Papua. Ungkapan-ungkapan massa dalam bentuk unjuk rasa pada hari-hari bersejarah dan dukungan terhadap tokoh-tokoh yang memperjuangkan aspirasi tersebut merupakan penanda bahwa gerakan ini tetap hidup meski agak bersifat bawah tanah. Beberapa kali publik Jayapura dikejutkan dengan unjuk rasa terjadi pada tanggal 1 Mei di Abepura dan Jayapura yang memperingati peralihan kekuasaan UNTEA di tahun 1963 (www.hampapua.org/skp/legislation.html).

Peristiwa yang menarik perhatian hingga di tingkat nasional adalah proses pengadilan dua terdakwa, Filep Karma dan Yusak Pakage yang sudah berlangsung sejak Januari 2005 atas dakwaan sebagai penggerak demo penaikan bendera Bintang Kejora tgl. 1 Desember 2004 lalu. Perhatian nasional tersedot ke Abepura saat terjadi bentrokan antara polisi dengan pendemo yang sebagian besar merupakan mahasiswa di Abepura. Unjuk rasa berubah menjadi anarki saat terjadi pelemparan batu ke arah polisi yang menjaga gedung Pengadilan Negeri Jayapura dimana kedua orang tersebut diadili sehingga polisi dengan panik membalas dengan menyerang mahasiswa dengan peralatan yang dimilikinya. Bentrokan ini diliput langsung oleh seorang wartawan dan disiarkan di Metro TV sehingga menarik perhatian serius pejabat tinggi di Jakarta dan Jayapura sehingga terjadi pemecatan Kapolresta Jayapura, AKBP Moh Son Ani, dan Kasat Samapta Polresta Jayapura, AKP Novly Pitoy. Lebih dari itu, satu minggu sesudah kejadian, Kapolri turun ke Jayapura untuk meredam keadaan. Sejumlah anggota Polresta Jayapura dikenai sanksi disiplin dan administratif dalam sidang kode etik Polda Papua.

Brutalitas aparat penegak hukum tetapi juga oleh hakim Pengadilan Negeri Jayapura, A. Lakonie yang terlibat dalam tindak kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Namun demikian, tidak ada tindakan apapun terhadap hakim tersebut meski kesaksian korban jelas-jelas mengatakan demikian. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kemampuan otokritik instansi kejaksaan dibandingkan kepolisian dalam kasus ini.

Dalam rangkaian pengadilan kasus ini, terdapat insiden yang menggemparkan publik Jayapura saat pengacara terdakwa mendapat kiriman kepala anjing disertai kata-kata ancaman di muka kantor LBH Jayapura. Hal ini mengingatkan pola serupa yang dipakai untuk mengintimidasi pekerja HAM di berbagai tempat di Indonesia saat menangani kasus-kasus politik dan kali ini menimpa Pieter Ell SH dan Paskalis Letsoin SH. Bersama dengan SKP Jayapura dan *Franciscans International*, kasus ini dilaporkan kepada Pelapor Khusus PBB bagian kemandirian Pengadilan dan Pekerja HAM sekaligus guna diambil tindakan perlindungan terhadap mereka berdua dan pekerja HAM lainnya di Papua.

Jika ditempatkan dalam pola pengadilan kasus-kasus politik, pengadilan Filep Karma melanjutkan cara penghukuman yang telah dibuat oleh Pengadilan Negeri Wamena saat mengadili terdakwa kasus pembobolan gudang senjata 4 April 2003 dan Kasus Bolakme Oktober 2003 (www.hampapua.org/skp/indexe.html). Dalam kedua kasus tersebut, majelis hakim menjatuhkan hukuman lebih berat daripada tuntutan jaksa. Hal yang sama persis diulangi pada kasus Filep Karma dan Yusak Pakage. Secara terang-terangan, Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, FX. Soegiarto SH, menyatakan bahwa hal tersebut untuk membuat jera mereka yang mencoba melakukan tindak pidana makar. Dari fakta-fakta putusan tersebut menjadi jelas bahwa terdapat semacam pola penghukuman yang secara kental diwarnai kepentingan politik untuk menekan sekeras

mungkin kebebasan menyatakan aspirasi politik atau ideologi politik sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya penegakkan hukum secara adil dan demokratis belum terwujud dalam pengadilan kasus-kasus makar di Tanah Papua.

Sementara itu di tingkat regional, perkara Papua makin dibicarakan di Pasifik dengan gencarnya kampanye PDP yang berbasis di negara Vanuatu, tetapi juga karena upaya pemerintah Indonesia dalam usahanya meminimalisir berkembangnya dukungan terhadap perjuangan Papua di wilayah yang secara kultural dan geografis dekat dengan Tanah Papua.

3. Kebebasan perorangan (*civil liberties*)

Jika intimidasi terhadap dua pengacara di Jayapura mendapat perhatian luas dari media massa di Jayapura, situasi di wilayah Selatan Papua agak jauh dari pengamatan publik padahal pembatasan hingga perampasan kebebasan perorangan tetap menjadi salah satu isu yang memprihatinkan. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang bahkan penyiksaan masih tetap dilakukan oleh TNI meski secara hukum tidak ada kewenangan sedikitpun bagi aparat pertahanan negara untuk melakukan tindakan sedemikian. Kasus semacam itu dilaporkan⁷ oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung



Merauke (SKP KAM) terjadi di Merauke atas Siprianus, Rafael Kapura (25 tahun) dan Bartol Yolmen yang diduga pendukung aspirasi M karena menyimpan bahan-bahan bacaan seperti buletin WPIA (West Papua Indigenous Association)⁸, informasi mengenai Otorita Nasional Papua Barat, dan pernyataan anggota Konggres Amerika Serikat dari Samoa, yang dinyatakan sebagai "dokumen politik".

Alasan sedemikian ternyata masih juga terjadi dalam suasana dimana perjuangan aspirasi M bukanlah tabu dibicarakan orang. Perkara tersebut sudah sejak 1998 dengan gampang dan bebas dibicarakan dan dijamin oleh hukum asalkan tidak menggunakan kekuatan senjata sebagai bagian dari kebebasan berpendapat di muka umum. Dengan demikian tindakan TNI Kostrad Yonif 643 WNS tidak dapat diterima lagi.

Hal mirip adalah penangkapan orang-orang yang dicap sebagai tokoh TPN/OPM di Sarmi oleh satuan TNI. Di tempat ini hampir setiap tahun terjadi penangkapan sejumlah orang yang dicap sebagai tokoh OPM. Yang menarik adalah bahwa media menyiarkan dengan gambar dan berita di halaman pertama yang menyebutkan orang-orang tersebut dengan pangkat-pangkat kemiliteran seperti yang dipakai dalam dinas TNI. Meski telah diserahkan kepada pihak Polres Jayapura untuk diproses secara hukum, belum ada

⁷ "Kesaksian Korban Penganiayaan", Merauke: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke, 10 Mei 2005.

⁸ WPIA adalah organisasi yang dipimpin oleh Pdt. Karel Waromi yang aktif mengorganisir bekas pengungsi Papua yang kembali dari Papua New Guinea. Organisasi lebih bersifat sosial karena berusaha mencari bantuan dana dan barang dari UNHCR dan Pemda Papua bagi pengungsi. Kurang jelas afiliasi politik dari organisasi ini.

laporan lanjutan bahwa ketiga orang tersebut akhirnya dijadikan tersangka dan diajukan ke pengadilan. Kasus ini seakan-akan hilang lenyap ditelan bumi.

Suasana tegang tetap menyelimuti wilayah Mulia dan sekitarnya sebagai kelanjutan dari rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi sejak 17 Agustus 2004. Tiga denominasi gereja di Papua mengeluarkan pernyataan bersama tanggal 23 April 2005 yang menyoroti 'budaya rekayasa' di wilayah tersebut yang telah mengorbankan rakyat yang tidak berdosa. Dalam pernyataan itu ketiga denominasi gereja menuntut agar dibentuk tim investigasi oleh Komnas HAM dan Bupati Puncak Jaya ditangkap dan diadili. Tetap menjadi suatu tanda tanya bagi publik Papua mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa laporan disusun oleh berbagai kelompok tetapi belum pernah ada investigasi menyeluruh yang akurat dan berbobot serta memiliki kewibawaan hukum sehingga seluruh rangkaian peristiwa di wilayah tersebut dapat dijelaskan dan dituntaskan. Komda HAM Papua telah dibentuk dan beberapa kali didesak oleh Gereja-gereja di Papua dan masyarakat untuk turun tangan tetapi hal ini tak kunjung terjadi.

4. Kematian Otsus

Meski selalu diberitakan di media massa tentang pencairan dana Otsus, hakikat Otsus sendiri makin tidak kelihatan wujudnya. Hingga bulan keenam sesudah dikeluarkan PP 54/2004 tentang MRP, tidak terdapat satu gerakan sistematis dari pemerintah Provinsi Papua untuk mengambil langkah yang serius dalam menetapkan peraturan daerah Provinsi untuk membentuk MRP. Desakan datang dari berbagai pihak seperti dari Dewan Adat, Persekutuan Gereja-gereja di Papua, kelompok pengamat terhadap Pemprov agar segera menginformasikan kepada masyarakat apa isi MRP sebelum melangkah ke tahap tata cara pemilihan MRP.

Pemantauan jaringan SKP di berbagai tempat di Papua menunjukkan bahwa sosialisasi hanya terjadi pada kelompok pegawai negeri dan jumlahnya terbatas padahal calon pemilih adalah masyarakat luas. Tidak tersedia informasi yang lengkap mengenai kedudukan MRP, tata cara pemilihannya dan arah keberadaan MRP sehingga masyarakat biasa cukup dibingungkan dengan potongan-potongan informasi yang beredar di Papua baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan.

Ganjalan yang tidak pernah mampu dipecahkan bahkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah keberadaan de facto IJB yang belum memiliki dasar hukum. Dilaporkan terjadi pertemuan segitiga di Timika pada tgl. 21 April 2005 antara Gubernur Papua, Penjabat Gubernur IJB dan Sekretaris Menkosospolkam untuk menyelesaikan masalah IJB tetapi senyatanya tidak ada jalan keluar yang ditempuh. Ketiga pihak jalan masing-masing dan meneruskan agenda politiknya sendiri-sendiri. Hal ini terbukti dengan proses Pilkada Gubernur IJB yang terus menerus ditegaskan sebagai hal yang sah berdasarkan PP 6/2005. Padahal, jelas-jelas dalam PP MRP bahwa penyelesaian status IJB harus melalui keterlibatan Pemerintah Pusat, Pemprov Papua, MRP dan DPRP.

“MRP bersama Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP sebagai provinsi induk bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Pemerintah menyelesaikan masalah pemekaran Wilayah yang dilakukan sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini dengan memperhatikan realitas dan sesuai peraturan perundang-undangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pelantikan anggota MRP”.

PP 54/2004 pasal 73

B. HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Dibandingkan dengan pelanggaran hak-hak sipil dan politik yang tampak di mata, perkara ini lebih bersifat kasat mata meski tidak bisa dikatakan dampaknya lebih ringan dan boleh jadi lebih berjangka panjang. Berikut ini disoroti sejumlah pokok masalah yang termasuk dalam hak ESB.

1. Pembalakan kayu liar (*illegal logging*)

Setelah bertahun-tahun ratusan hektar hutan telah menjadi korban dari pembalakan kayu liar khususnya di wilayah Kalimantan, Pemerintah akhirnya mengambil tindakan tegas dengan pemberantasan pencurian kayu yang diduga keras sebagai bagian dari jaringan bisnis internasional menurut hasil investigasi LSM Tapak. Secara resmi, penanganan tindak kejahatan yang dijuluki Operasi Hutan Lestari II berakhir pada 5 Mei 2005. Sekarang masyarakat menantikan proses hukum yang sedang berlangsung khususnya pengadilan terhadap 136 orang tersangka pelaku tindak kejahatan yang telah merugikan negara milyaran dolar Amerika juga 370.244 meter kubik kayu gelodongan serta 19.728 meter kubik kayu olahan kelas satu. Dari proses penanganan hukum ini, terdapat hal-hal yang menarik untuk disoroti baik aktor-aktor yang terlibat, pendapat tokoh adat, tanggapan pejabat pemerintah, serta tanggapan petinggi militer dan polri.

Gunjingan masyarakat atau rahasia umum yang telah beredar di tengah masyarakat hanya dikuatkan saja dengan diseretnya berbagai pejabat daerah setingkat kepala dinas atas dakwaan pembalakan kayu liar karena memberikan izin. Sebaliknya, pelaku yang berstatus anggota TNI dan Polri setingkat perwira menengah diseret karena dakwaan sebagai pelindung kegiatan ilegal tersebut—semua mengisi kronik April-Juni ini. Namun demikian terdapat unsur-unsur mencolok yang pantas dicermati agar kita mendapat gambaran lebih tajam mengenai apa yang sebenarnya terjadi.

Di media massa Jayapura, seringkali dikutip pernyataan pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh adat yang menyesalkan OHL yang terus berlanjut dan penghentian segala macam kegiatan selama operasi terpadu itu berlangsung. Alasan yang dikemukakan tampaknya membela kepentingan rakyat karena mereka berpendapat bahwa dengan penghentian kegiatan, ekonomi rakyat macet, pendapatan rumah tangga terganggu, pendapatan daerah juga berkurang. Dilaporkan bahwa sejumlah tokoh masyarakat mendatangi tempat tahanan dimana cukong *illegal logging* ditahan di Polda Papua guna menunjukkan "rasa simpati". Namun jika ditinjau lebih jauh, berapa sebenarnya kerugian yang diderita oleh negara dan terlebih masyarakat adat karena industri ini dalam kerangka lebih luas, argumen yang ditampilkan di media itu akan gugur dengan sendirinya. Pendapatan daerah dan pendapatan rakyat dari kayu Merbau tidak ada harganya dibandingkan dengan untung yang dikeruk oleh pelaku pembalakan kayu liar saat menjual dagangannya ke Cina dengan harga ribuan dollar AS per kubik.

Di Sorong, M.L. Rumadas, terdakwa kasus pembalakan kayu liar justru diangkat sebagai Sekda Provinsi IJB oleh Pjs. Gubernur Abraham Atururi. Ada dua kejanggalan besar yang dengan mudah dilihat, yakni *pertama* bagaimana mungkin seorang terdakwa dilantik menduduki jabatan pemerintahan yang begitu tinggi di tingkat provinsi sementara pemerintah hendak mencanangkan pemerintahan yang bebas KKN. *Kedua*, bagaimana mungkin seorang Pejabat sementara gubernur melantik pejabat tinggi daerah padahal kewenangan tidak dimilikinya. Kedua hal ini tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan Departemen Dalam Negeri sehingga patut dipertanyakan secara keras

apa maksud Depdagri membiarkan semua pelanggaran hukum terjadi begitu terbuka dan tanpa dihalangi.

Di Jayapura, tindakan terhadap anggota TNI yang disangka terlibat dalam bisnis ini juga pantas diikuti karena tidak seorangpun dinonaktifkan. Semuanya tetap bertugas dan bahkan Pangdam Nurdin Zainal sendiri menegaskan hal ini. TNI yang terlibat tidak hanya berasal Angkatan Darat tetapi sejumlah anggota TNI Angkatan Laut juga dikenai status tersangka dan menjalani proses penyidikan. Berbeda dengan tindakan TNI, Polri sebagai aparat penegak hukum mengambil langkah lebih tegas menurut prosedur hukum yang ada. Salah seorang tersangka utama, Kopol Marthen Reno, diterbangkan ke Jakarta untuk diperiksa langsung di Mabes Polri.

Lebih lanjut terdapat perbedaan juga di tingkat proses penegakan hukum. Segala upaya penegakan hukum terhadap anggota TNI dan Polri masih terbatas pada tingkat penyidikan sementara upaya penuntutan dilakukan bagi pejabat sipil. Perbedaan sikap ini menarik untuk disoroti mengingat bahwa hal serupa tidak akan bisa terjadi pada rakyat jelata. Jika kita bandingkan dengan bagian di atas mengenai kebebasan berekspresi, rakyat biasa telah dijatuhi vonis 'makar' sebelum pengadilan menjatuhkan putusannya yang resmi. Dari sini masing-masing orang bisa menarik kesimpulan sebenarnya berapa adil dan merata penegakan hukum yang ada di Tanah Papua ini?

2. Korupsi di pemerintahan

Laporan mengenai dugaan korupsi pejabat daerah yang diadili makin mudah dibaca di media dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Seiring dengan gencarnya upaya KPK menangani korupsi di tubuh KPU dan badan-badan negara lainnya di tingkat nasional, pengaruh itu makin terasa di ujung timur Nusantara ini meski tangan-tangan KPK sendiri tidak sampai ke tingkat penanganan langsung kasus-kasus di Papua ini. Sejumlah kepala dinas dan pejabat-pejabat kabupaten diperiksa dan sebagian diajukan ke pengadilan. Akan tetapi, proses ini berjalan lambat karena secara prosedural pemeriksaan pejabat pemerintah harus didasarkan izin atasannya dan di tingkat bupati dan gubernur, izin itu harus datang dari Presiden.

Salah satu nama yang dilaporkan puluhan kali di media dari dua tahun terakhir adalah Bupati Jayawijaya, David Hubi. Berbagai demo dari guru-guru, pegawai kabupaten, tenaga kesehatan, hingga pebisnis mengenai tunggakan utang Pemkab Jayawijaya terhadap mereka menunjukkan bahwa ada problem serius yang tidak bisa dipecahkan oleh rakyat karena tidak ada kekuatan untuk mendobrak skandal keuangan yang telah menguasai Pemkab Jayawijaya.

Sementara itu, dugaan korupsi juga disangkakan pada Bupati Nabire, A.P. Youw, yang telah mengalami pemeriksaan oleh Polda Papua beberapa kali diselingi demo dari kelompok pendukungnya; dan selanjutnya tidak terdengar lagi beritanya.

3. Dunia pendidikan

Bidang ini menjadi primadona kampanye PILKADA di Papua dan bahan pidato Gubernur Papua selama ini di berbagai kesempatan saat menjelaskan Otsus Papua. Jika kita melihat catatan faktual di atas, terdapat berbagai indikasi bahwa kenyataan di lapangan berbeda dengan kampanye dan pidato para pejabat pemerintah tersebut.

Misalnya, di Jayapura saja guru-guru honor mengadu karena honor tidak dibayar, janji bebas uang UAN ternyata tinggal janji karena SMA Korpri Jayapura tetap dikenai;

tingginya angka siswa SMU yang tidak lulus di Jayapura; dana kesejahteraan guru di Jayapura yang hanya Rp. 5.000,-/ bulan. Semua ini menjadi penanda seberapa jauh pendidikan rakyat menjadi kebijakan yang betul serius dicanangkan dan tercermin dalam prosentase alokasi dana dalam APBD, kesejahteraan guru-guru, pengawasan dan pembinaan guru-guru secara profesional, kesiapan pihak Dinas P dan P untuk melayani kenaikan pangkat dan golongan guru-guru secara efisien. Ironisnya, dilaporkan berbagai dugaan korupsi dalam Dinas ini sehingga sejumlah aparat pemda diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.

Seperti di bagian lain di Indonesia, di Papua pendidikan belum dipandang sebagai hak asasi manusia melainkan sebagai layanan publik semata yang tak jarang diperjual belikan. Rakyat jelata yang tinggal di pedalaman Papua hampir tidak mempunyai peluang memadai untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu.

4. Kesejahteraan masyarakat

Selain bidang pendidikan, bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat menjadi unsur kedua dari tritunggal primadona kampanye dan janji-janji pejabat. Masyarakat di berbagai kota di Papua selama bulan-bulan terakhir telah memiliki irama hidup tambahan yakni mencari minyak tanah. Antrean minyak tanah terjadi di Jayapura, Wamena, Merauke, Manokwari, Timika bahkan kota minyak, Sorong sebagaimana dilaporkan oleh mitra kerja kami. Problem ini bersifat nasional dan tak kunjung mendapatkan jalan keluar sehingga di sejumlah tempat, rakyat berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM.

Seperti problem di dunia pendidikan, tidak ada langkah yang nyata dari pihak pemerintah daerah untuk menangani kelangkaan minyak dan air bersih. Problem ini tampaknya mengatasi kemampuan Pemkot atau Pemkab Jayapura karena kelangkaan yang sama dan dalam tingkat lebih hebat dilaporkan terjadi di berbagai tempat di Indonesia bahkan terjadi krisis energi yang berdampak pada pengurangan pemakaian listrik di Jakarta, ibukota negara dan pusat bisnis terbesar di Indonesia.

Sementara itu jika dilihat perbandingan alokasi dana APBD antara belanja aparatur negara dan belanja publik di sejumlah kabupaten seperti Jayapura, Sarmi atau Jayawijaya, terdapat ketimpangan yang nyata. Anggaran untuk belanja aparat umumnya lebih besar dibandingkan belanja publik sehingga tak heran bahwa layanan publik yang seharusnya diutamakan ternyata justru dikorbankan.

C. Hak-hak Perempuan

Laporan media yang dicatat dalam kronik di atas hanyalah sebagian kecil dari kenyataan harian yang dialami oleh perempuan: kekerasan termasuk kekerasan seksual. UU No. 23/2004 tentang KDRT telah diundangkan dan di berbagai kesempatan telah didiskusikan oleh kalangan LSM, Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan atau Kepolisian. Bagaimana publik betul menyerap informasi dan aparat penegak hukum siap menerapkannya dalam seluruh sistem penegakan hukum berbasis gender?



Hal yang patut dicatat dalam triwulan kita ini adalah laporan adanya perdagangan perempuan di Jayapura saat terjadi pengaduan sekelompok perempuan muda ke Polsekta Abepura. Kasus ini diselesaikan secara cukup sederhana dengan mengembalikan korban tersebut ke daerah asalnya tetapi pihak yang diadukan tidak mendapat sanksi pidana dan tidak ada proses penyidikan lebih jauh mengenai siapa yang bergerak di belakang penipuan terhadap perempuan muda tadi. Seandainya penyidikan dan pengungkapan fakta di balik pengaduan itu dilakukan, bukan tidak mungkin fakta-fakta penting lain yang melatarbelakangi terjadinya tindak penipuan dapat diungkapkan kepada publik.

Bidang perhatian terhadap perempuan amat terkait dengan unsur kesehatan dan layanan kesehatan masyarakat yang tersedia sehingga beberapa unsur utama berikut ini patut kita cermati.

Pertama, kenyataan yang dapat dirangkaikan dengan perdagangan perempuan di sini adalah data PKBI Papua bahwa 99% PSK di Tanjung Elmo, Sentani, telah mengidap penyakit menular seksual dari tempat asalnya. Fakta-fakta ini boleh jadi dapat menjelaskan mengapa tingkat penyebaran HIV/AIDS terus meningkat padahal kampanye pihak KPAD dan ASA terus bergema juga berbagai kelompok medis dan agamawan telah membentuk tim pendamping ODHA yang secara giat melakukan pelayanan di bidang konseling.

Unsur *kedua* yang kerap kali dilaporkan di media sebagai unsur penunjang tindak kekerasan terhadap perempuan dan telah menjadi bagian dari *mob* di Papua adalah perdagangan dan konsumsi minuman keras yang tak terkendali lagi. Dengan mudah ditemukan di setiap sudut kota sekelompok pemuda duduk di tepi pantai, di taman kota, di pinggir toko bahkan di pinggir rumah orang menikmati minuman keras tanpa kenal waktu. Meningkatnya konsumsi miras tanpa batas apalagi ilegal berdampak buruk pada tingkat kesehatan masyarakat, kenyamanan umum, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Ketiga, dilaporkan hampir setiap hari upaya polisi menggerebek pembuatan minuman keras lokal dan upaya pengiriman ke pedalaman tetapi belum dilaporkan usaha pemerintah untuk mendirikan satu klinik guna menangani orang kecanduan alkohol atau menyediakan tempat yang khusus bagi mereka yang berminat menikmati minuman keras sehingga tidak mengganggu ketertiban umum.

Persoalan alkoholisme bukan hanya dihadapi oleh rakyat Papua. Di negara maju sekalipun, hal ini tetap menjadi tantangan dan bahkan ancaman yang serius sehingga penanganan terhadap masalah ini perlu bersifat komprehensif dengan mencakup unsur medis, penegakan hukum, unsur psikologis dan kebijakan publik. Alkoholisme adalah suatu penyakit dan jika penyakit ini diderita oleh banyak orang secara terus menerus dapat menjadi wabah yang sulit ditanggulangi. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah pemerintah dan rakyat sadar dan berani mengakui bahwa ini adalah penyakit yang perlu ditangani serius? Apakah kita masih terbius oleh retorika bahwa AIDS dan alkoholisme bukan penyakit tetapi semacam 'kutukan' Tuhan terhadap dosa manusia? Apakah kita masih mau menjadikan dua penyakit serius ini sekedar sebagai amunisi dalam kampanye politik?

“Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota berkewajiban mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit endemis dan/ atau penyakit-penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk”.
UU No. 21/2001 pasal 59 ayat 2

Penutup

Potret rumah kita, Papua, kiranya tidak banyak berubah dari catatan tiga bulan sebelumnya selain unsur PILKADA yang mendominasi seluruh dinamika sosial politik di seluruh pelosok Tanah Papua. Secara umum belum ada dasar kuat untuk optimis dalam hal pemenuhan hak-hak asasi manusia entah di bidang sipil dan politik atau ekonomi, sosial, budaya padahal UU no. 21/2001 tentang Otonomi Khusus senantiasa menjadi acuan dan bahan pidato politik. Karena itu pelan tetapi pasti Otsus menjadi bahan sindiran dan kritik balik kepada Pemerintah. Catatan aktual berikut kiranya akan mencatat dinamika ini secara lebih dekat.

